

# LAPORAN KINERJA KPPN PAINAN TAHUN 2020

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam system penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Kinerja Tahun 2020 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja memiliki fungsi secara eksternal sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan pendekatan kuantitatif, dan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan. Sedangkan secara internal diharapkan laporan ini dapat memacu peningkatan kinerja setiap seksi/subbagian yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

LAKIN KPPN Painan Tahun 2020 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Painan tahun 2020 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN Painan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Painan, 28 Januari 2021  
Kepala KPPN Painan



Lita Qadarina Hardian  
NIP 197509251995112001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2020 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja sebagaimana mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan tahun 2020. Pencapaian kinerja KPPN Painan pada tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 98,93 dari target 88;
2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 99,30 dari target 94;
3. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 99.42% dari target 80%;
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,97 dari target 4,55;
5. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 4 dari target 3;
6. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu tersealisasi sebesar 99.91% dari target 99.40%;
7. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 92.69 dari target 87;
8. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 98%;
9. Nilai kinerja peyaluran DAK dan Dana Desa terealisasi sebesar 99.64 dari target 80;
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
11. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98,1%;
12. Nilai rata rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 84.7 dari target 77;
13. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 95.8 dari target 80;
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 93.69 dari target 83;
15. Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan terealisasi sebesar 78 dari target 74;
16. Persentase pengelolaan BMN yang optimal terealisasi sebesar 97.62% dari target 92%;
17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 91 dari target 81;

18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 95.09% dari target 95%;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah:

1. (N I H I L)

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	C. Peran Strategis	7
	D. Sistematika Laporan	13
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
	A. Rencana Strategis	13
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	13
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi	22
	B. Realisasi Anggaran	71
	C. Kinerja Lain-Lain	75
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan 2020</li><li>▪ Rencana Kinerja Tahunan KPPN Painan 2020</li><li>▪ Formulir Pengukuran Kinerja KPPN Painan 2020</li><li>▪ Form II ADIK Rencana Kerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2020</li></ul>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- C. PERAN STRATEGIS**
- D. SISTEMATIKA LAPORAN**

## A. LATAR BELAKANG



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A2 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

## B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Painan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya KPPN Painan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN

#### **Subbagian Umum;**

Yang mempunyai tugas tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

#### **Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;**

Yang mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker, dan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, dan penyediaan layanan perbendaharaan.

#### **Seksi Bank;**

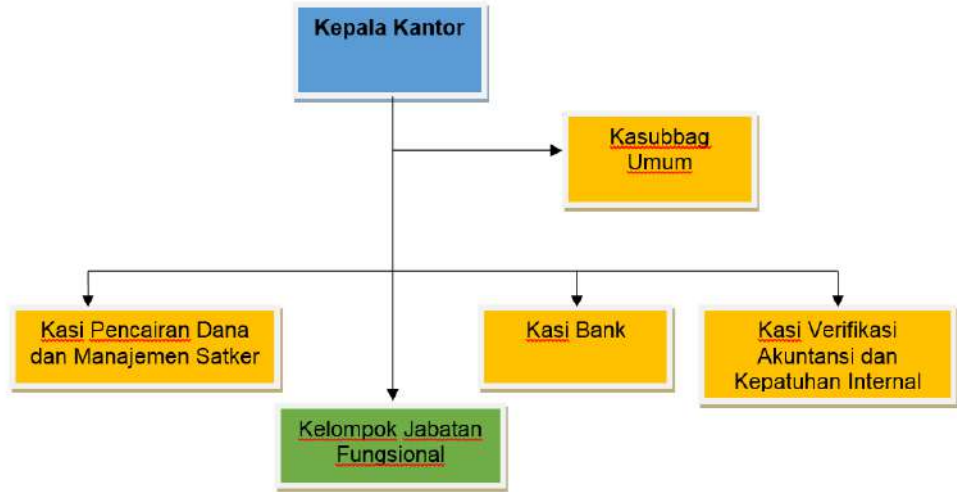
Yang mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Mengelola PFK dan SIKP.

#### **Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal**



Yang mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran, analisis data statistik laporan keuangan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara lebih rinci struktur organisasi KPPN Painan di gambarkan dalam bagan di bawah ini :



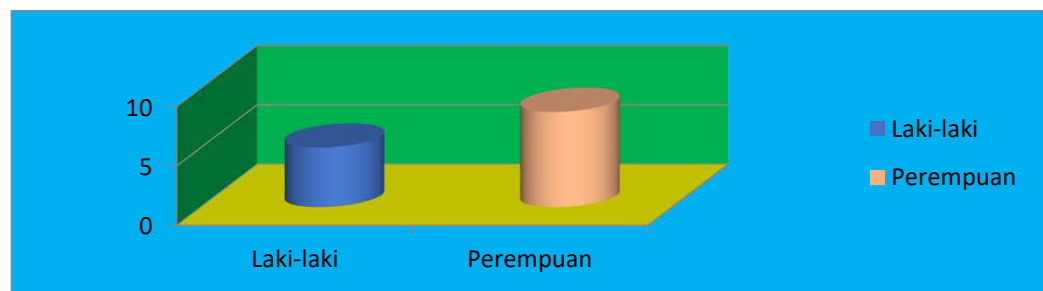
Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan per 31 Desember tahun 2020 adalah sebanyak 13 orang pegawai, dengan statistik sebagai berikut :

TABEL 1.1  
SDM KPPN Painan Per 31 Desember 2020

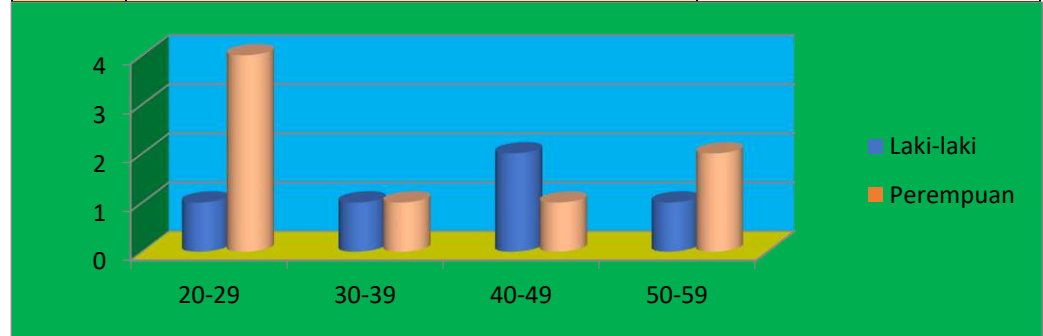
Statistik Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	8



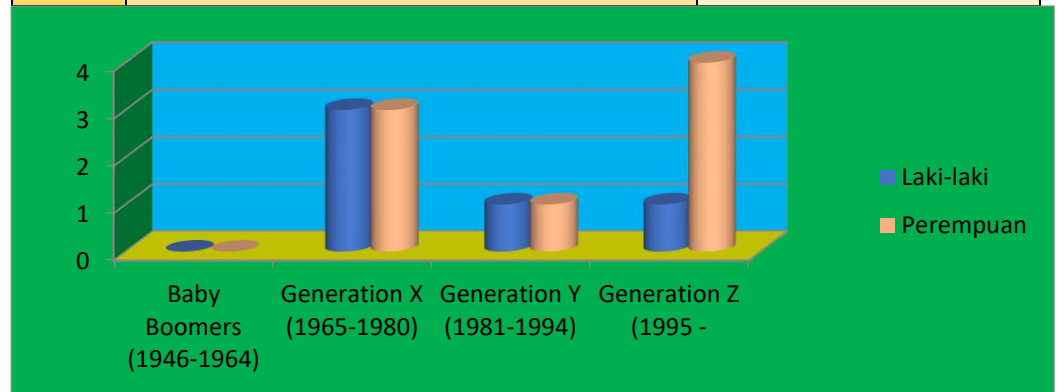
Statistik Pegawai berdasarkan kelompok Usia

No	Usia	Jumlah
1	20 – 29	5
2	30 – 39	2
3	40 – 49	3
4	50 - 59	3



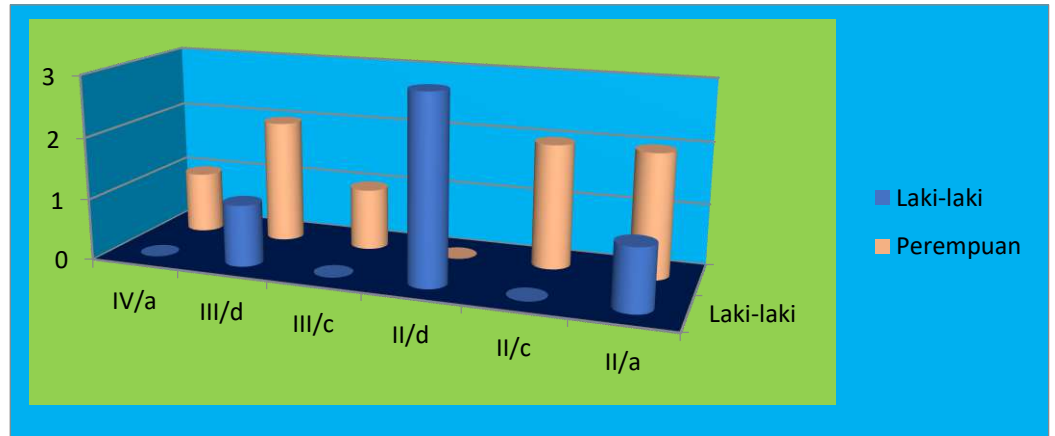
Statistik Pegawai berdasarkan kelompok generasi

No	Kelompok Generasi	Jumlah
1	Baby Boomers ( 1946-1964 )	0
2	Generation X ( 1965-1980 )	6
3	Generation Y ( 1981-1994 )	2
4	Generation Z ( 1995- ..... )	5



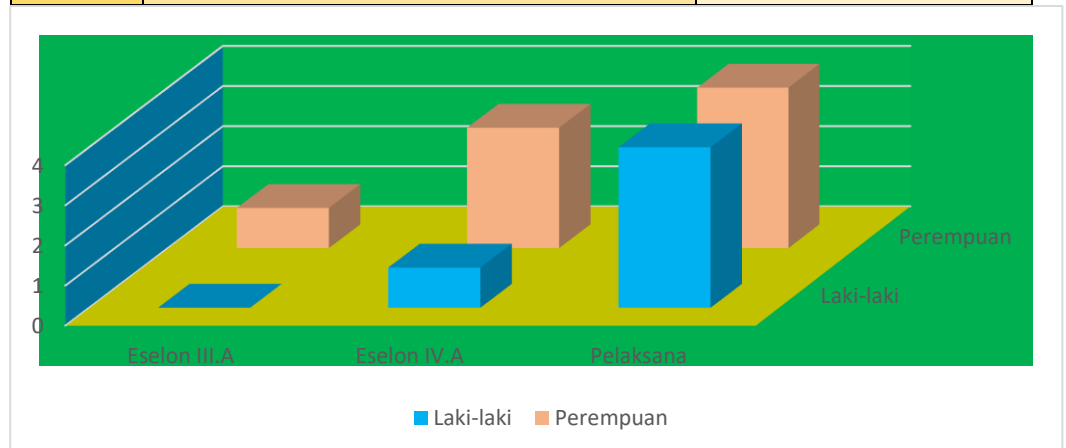
Statistik Pegawai berdasarkan kepangkatan

Pangkat	IV/a	III/d	III/c	II/d	II/c	II/a
Laki-laki	0	1	0	3	0	1
Perempuan	1	2	1	0	2	2



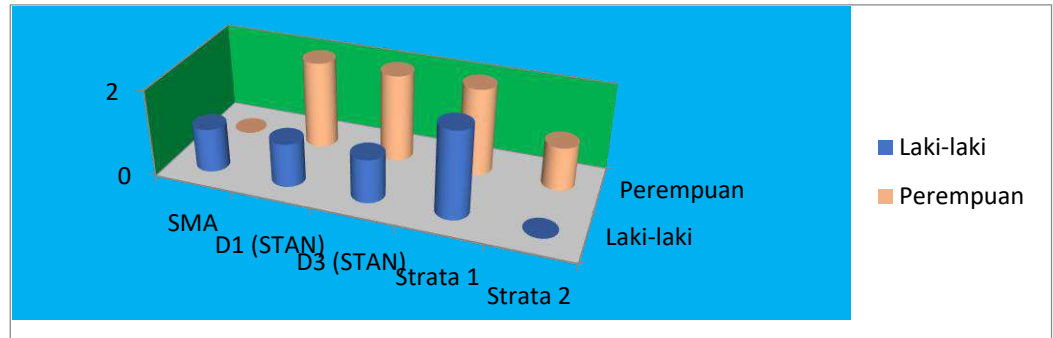
Statistik Pegawai berdasarkan Eselon jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon III.A	1
2	Eselon IV.A	4
2	Pelaksana dan kelompok Fungsional	8



Statistik Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	SMA	D.1	D.3	S.1	S.2
Jumlah	2	3	3	4	1



Beberapa kegiatan internal telah dilakukan KPPN Painan dalam meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas para pegawai sebagai berikut:

1. Gugus Kendali Mutu (GKM), dilaksanakan untuk menyamakan persepsi/pemahaman terhadap aturan-aturan terbaru yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
2. *Briefing* pagi, Setiap hari senin dan kamis pagi (kecuali minggu pertama) sebelum jam layanan dibuka, KPPN Painan mengadakan *Briefing* pagi yang diisi dengan doa bersama, internalisasi strategi organisasi KPPN Painan, Visi dan Misi DJPb serta Visi dan Misi KPPN Painan, kemudian salah satu orang memberikan informasi positif sekaligus membahas *issue* terbaru terkait pelaksanaan tugas.
3. *Sharing Knowledge*, merupakan transfer knowledge dari pegawai yang telah melaksanakan diklat atau bimtek kepada para pegawai.
4. Pelatihan *Service Excellent*, Pelatihan ini diadakan dua kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja KPPN Painan.
5. Pemilihan Pegawai Teladan, kegiatan ini untuk memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja.
6. *Capacity Building*, kegiatan ini dilakukan dua kali dalam setahun untuk meningkatkan kekompakan dan kerja sama diantara para pegawai. Sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik di KPPN Painan.

### C. PERAN STRATEGIS

Disamping mengemban kewenangan kebendaharaan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu sekaligus berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan disini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* yang dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. Pengujian secara *rechmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian formal terhadap pihak yang berhak mengajukan tagihan pada negara berdasarkan bukti –bukti yang sah. Sedangkan pengujian secara *wetmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian atas ketersediaan dana dalam APBN/DIPA.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, peran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah,
3. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat KPPN.

Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Painan berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi, selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Kementerian Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (*repetition*) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah:

- penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
- perekaman data dilakukan cukup sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
- pembakuan *business rules* untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak, baik lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal seperti Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh *Stakeholders*.

Selama tahun 2020, terdapat beberapa isu yang dihadapi KPPN Painan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain :

#### **1. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa**

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai oleh DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK Fisik terbagi atas DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan.

Sementara UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah dan desa, KPPN Painan selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa meyalurkan dana transfer berupa DAK Fisik (DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi, dan DAK Fisik Penugasan) dan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

##### **a. Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2020 Kab. Pesisir Selatan**

Realisasi transfer DAK Fisik sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp132,290,359,847 atau 95,35% dari pagu anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rp138.739.057.000,-. Realisasi DAK Fisik sampai dengan 31 Desember 2020 disalurkan untuk DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi masing-masing sebesar Rp113,180,589,683,-, Rp15,393,745,164,-, dan

Rp3,716,025,000,-.

Realisasi transfer DAK Fisik per 31 Desember mengalami penurunan sebesar Rp.34,755,535,062 atau 20.8% dari posisi per 31 Desember 2019. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sehingga COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi.

Realisasi transfer DAK Fisik (bruto) sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan daerah penerimaan yang telah disalurkan oleh KPPN Painan selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

REALISASI PENYALURAN DAK FISIK TAHUN 2020 KAB. PESISIR SELATAN

No	Jenis Dana	Bidang	Sub Bidang	Pagu	Nilai Kontrak	Penyaluran
1	Reguler	Pendidikan	Sekolah Dasar (SD)	11,158,303,000	11,158,303,000	10,203,777,704
2	Reguler	Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11,357,486,000	11,357,486,000	11,271,658,425
3	Reguler	Pendidikan	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	802,729,000	802,729,000	798,845,950
4	Reguler	Pendidikan	Perpustakaan Daerah	9,862,197,000	9,862,197,000	9,862,196,800
5	Reguler	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	306,079,000	306,079,000	306,063,500
6	Reguler	Kesehatan dan KB	Pelayanan Dasar	23,045,339,000	23,045,339,000	22,353,906,998
7	Reguler	Kesehatan dan KB	Pelayanan Rujukan	20,065,441,000	20,065,441,000	18,812,324,613
8	Reguler	Kesehatan dan KB	Pelayanan Kefarmasian	2,625,938,000	2,625,938,000	2,551,742,463
9	Reguler	Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	1,232,100,000	1,232,100,000	1,150,067,431
10	Reguler	Air Minum - Cadangan	Air Minum Reguler	566,133,000	566,133,000	305,751,000
11	Reguler	Sanitasi - Cadangan	Sanitasi (Reguler)	934,181,000	934,181,000	934,181,000
12	Reguler	Perumahan dan Pemukiman - Cadangan	Perumahan dan Pemukiman (Reguler)	3,080,334,000	3,080,334,000	3,080,334,000
13	Reguler	Jalan - Cadangan	Jalan (Reguler)	32,184,412,000	32,184,412,000	31,549,739,799
14	Penugasan	Kesehatan	Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,762,521,000	2,762,521,000	2,201,602,880
15	Penugasan	Kesehatan	Penurunan AKI-AKB	485,932,000	485,932,000	376,310,000
16	Penugasan	Kesehatan	Penguatan Intervensi Stunting	631,022,000	631,022,000	630,826,480
17	Penugasan	Air Minum - Cadangan	Air Minum Penugasan	1,593,000,000	1,593,000,000	1,547,976,000
18	Penugasan	Irigasi - Cadangan	Irigasi	6,506,462,000	6,506,462,000	5,651,992,934
19	Penugasan	Pariwisata - Cadangan	Pariwisata	2,723,155,000	2,723,155,000	2,326,438,400
20	Penugasan	Pertanian - Cadangan	Pertanian	1,071,556,000	1,071,556,000	711,555,200

21	Penugasan	Kelautan dan Perikanan - Cadangan	Kelautan dan Perikanan	1,991,145,000	1,991,145,000	1,947,043,270
22	Afirmasi	Pendidikan	Sekolah Dasar (SD) - Afirmasi	430,000,000	430,000,000	430,000,000
23	Afirmasi	Transportasi Perdesaan - Cadangan	Transportasi Perdesaan	3,323,592,000	3,323,592,000	3,286,025,000
JUMLAH TOTAL				138,739,057,000	138,739,057,000	132,290,359,847

#### b. Penyaluran Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp167,395,647,000,- dan Rp.166,305,833,000,-. Realisasi transfer Dana Desa tercapai 100% dari anggaran transfer dana desa sebesar Rp.167,395,647,000,-.

Realisasi Transfer Dana Desa per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1,089,814,000 atau 0.66% dari posisi per 31 Desember 2019.

Realisasi transfer Dana Desa (bruto) sampai dengan 31 Desember 2020 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN Painan selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

#### REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2020 KAB. PESISIR SELATAN (dalam ribu rupiah)

No	Pagu DIPA	Jumlah Desa	Tahap I	Tahap II			Tahap III	Total Penyaluran
			Reguler	Bulan I	Bulan II	Bulan III	Reguler	
1	167,395,647	182	67,716,858	25,098,790	25,098,790	16,732,527	32,748,679	167,395,647

## 2. Implementasi SAKTI Satker Lingkup Kementerian/Lembaga

Dalam rangka implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, KPPN Painan telah melakukan tahapan demi tahapan dalam implementasi SAKTI ini, yaitu:

- a. Pendampingan Transaksi awal tahun 2020 (SAKTI desktop) kepada mitra KPPN satker K/L
- b. Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahan I)
- c. Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I)
- d. Refreshment training SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop)
- e. Pendampingan Migrasi Saldo awal SAKTI tahun 2020 berdasarkan LKKL Unaudited (SAKTI Desktop) pada 5 K/L yang ditunjuk
- f. Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020



- g. Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Web
- h. FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Web (SAKTI Web full modul)
- i. Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Web (Modul Penganggaran/implementasi redesign penganggaran) seluruh Satker K/L
- j. Pendampingan penyusunan RKAKL/DIPA 2021
- k. Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)
- l. Pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP)
- m. Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V

### c. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kinerja pelaksanaan anggaran K/L dinilai berdasarkan nilai IKPA. Penilaian IKPA menjadi salah satu penentu pemberian *reward* untuk DIPA tahun anggaran berikutnya. Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran tersebut meliputi empat aspek yang dijabarkan dalam 12 indikator (IKPA), yaitu:

Aspek	IKPA
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA
	Deviasi Halaman III DIPA
	Pagu Minus
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data kontrak
	Pengelolaan UP dan TUP
	LPJ Bendahara
	Dispensasi SPM
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran
	Penyelesaian Tagihan
	Konfirmasi Capaian Output
	Retur SP2D
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas
	Kesalahan SPM

Sedangkan isu lain yang tidak berkaitan secara langsung dalam pengelolaan APBN selama tahun 2020 bahwa KPPN Painan telah mengikuti Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dimana KPPN Painan berhasil mendapatkan Sertifikat WBK dari Menteri Keuangan dan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**D. SISTEMATIKA LAPORAN** Sistematika penyajian LAKIN KPPN Painan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
  - B. Realisasi Anggaran  
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
  - C. Kinerja Lain-Lain
4. Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran  
Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan Tahun 2020, Formulir Pengukuran Kinerja 2020, dan Rencana Kinerja Tahunan 2020, dan Form II ADIK Rencana Kinerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2020.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS**
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA**

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi itu sendiri.

### *Visidan Misi KPPN Painan*

Dengan mengacu terhadap Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah menetapkan visi, yaitu:

**“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, akuntabel dan inovatif”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel
3. Mewujudkan pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

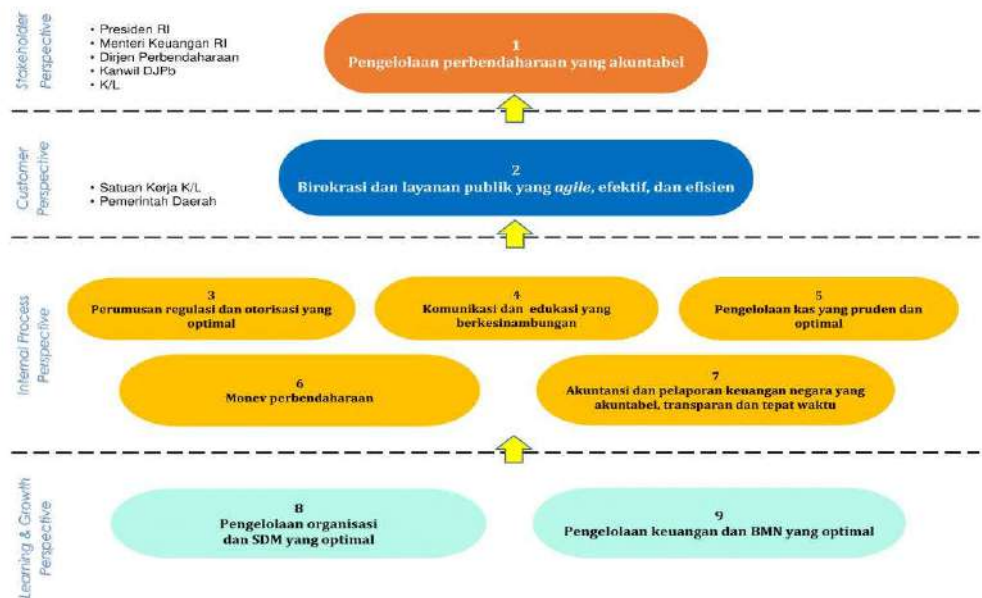
MOTTO KPPN Painan yaitu “Kami berkomitmen melayani anda dengan MOTTO **TERBAIK**” Transparan, Efektif dan Efisien, Responsif, Berkelanjutan, Andal, Inovasi, dan Kompeten.

## B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2020 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1  
PetaStrategi Kepala KPPN Tahun 2019

PetaStrategiKe  
pala KPPN  
Tahun 2020



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh

organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

▪ **Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, Laporan Keuangan yang memadai serta tingkat akurasi perencanaan kas yang tinggi.

Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L, Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN dan Persentase akurasi perencanaan kas KPPN.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

**Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi stakeholder terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pelayanan yang didukung dengan pengembangan aplikasi yang mudah dipahami oleh petugas Satker dan komunikasi yang baik antara KPPN dan satker membuat satker merasa lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan kemudahan dalam penyampaian LPJ, e-rekon LK, pendaftaran supplier dan lainnya yang pada akhirnya mengurangi adanya spm retur. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

a. **Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal**

Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, regulasi sangat diperlukan baik itu dalam aturan maupun aplikasi yang mendukungnya khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan, sehingga dampaknya akan bisa dirasakan oleh satker secara optimal. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

**b. Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan**

Implementasi SPAN dan SAKTI akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, diperlukan suatu strategi manajemen satker, khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas Perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi.

**c. Pengelolaan kas yang pruden dan optimal**

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase LPJ bendahara yang andal dan tepat waktu

**d. Monev perbendaharaan**

Implementasi SPAN dan SAKTI akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, diperlukan suatu strategi manajemen satker, khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas Perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Nilai Kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa dan (2) Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

**e. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu**

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara professional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

**a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal**

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya, dan iklim. Organisasi yang baik tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Nilai rata rata *hard competency* pegawai, (2) Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, (3) Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, (4) Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan.

**b. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal**

Dana yang tersediadalam DIPA KPPN Painan harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA KPPN Painan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Persentase pengelolaan BMN yang optimal, (2) Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB, (3) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN



Pada tahun 2020, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2**  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPN Painan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5.	Pengelolaan kas yang prudent dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6.	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
8.	Pengelolaan	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i>	77

	organisasi dan SDM yang optimal	pegawai		
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, KPPN Painan didukung dengan anggaran tahun 2020 yang mendukungnya dengan 1 (satu) kegiatan dengan 5 (lima) output sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Kode	Program Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
08	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara			
1705.002	Layanan Perbendaharaan Kuasa BUN di daerah	37.933.000	25.248.925	66.56
1705.003	Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	6.926.000	2.714.400	39.19
1705.951	Layanan Sarana dan Prasara Internal	352.408.000	352.176.400	99.93
1705.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	41.576.000	40.009.400	96.23
1705.994	Layanan Perkantoran	1.067.229.000	1.022.696.968	95.84

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2020 DJPb melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan diantaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU Baru, dan penghapusan IKU dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perubahan ruang lingkup dan target IKU, yaitu:
  1. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D pada tahun 2019 dihilangkan, sehingga pada tahun 2020 hanya Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu adalah SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. Pada tahun 2020 mekanisme pengajuan SPM oleh satker

- diajukan melalui e-spm tanpa tatap muka karena adanya pandemi Covid-19.
2. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI, IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut : Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2020 yang terdiri atas 13 tahap secara tepat waktu dan pencapaian atas semua satker K/L yang mengimplementasikan SAKTI Web Full Modul pada tahun 2020.
  3. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan variabel yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJPb apalagi dengan adanya perubahan regulasi karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.
  4. Persentase Kualitas Pelaksanaan Coaching & Counseling, IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. Namun IKU ini tidak ada pada tahun 2020.
- b. Penetapan IKU Baru
1. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB, Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.

Pada capaian Kinerja Organisasi tahun 2019 seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tahun 2015-2019, walaupun beberapa IKU mengalami *refinement* namun tetap menggambarkan pencapaian sasaran strategis.

Selanjutnya dalam rangka tetap memonitor perencanaan startegis sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis KPPN Painan tahun 2020-2024, setiap IKU Kemenkeu *Three* dilaporkan capaiannya setiap triwulan secara berjenjang dan beberapa IKU *Cascading* diturunkan ke level Kemenkeu *Four* dan *Five* termasuk IKU yang menjadi Rencana Strategis KPPN Painan Tahun 2020-2024.

## **BAB III**

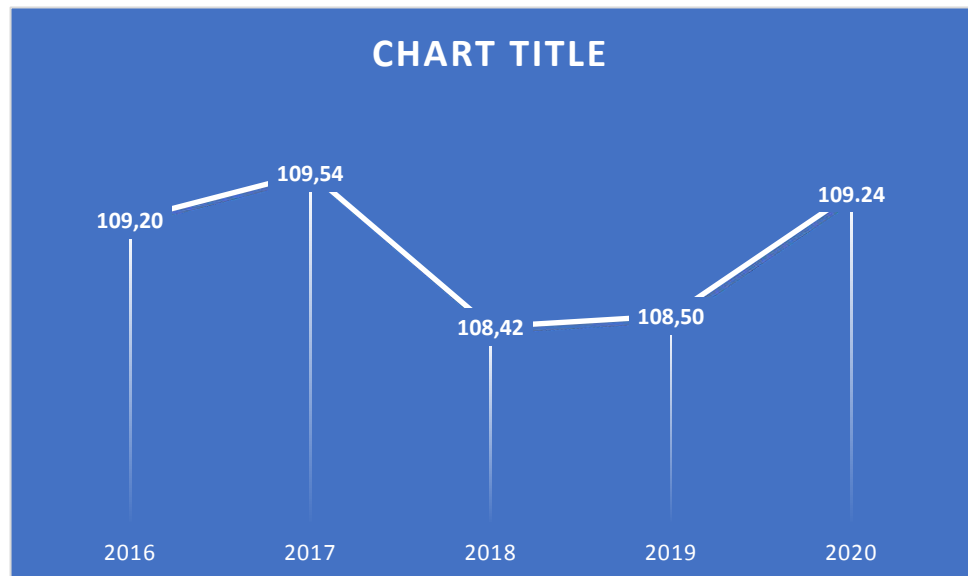
# **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**
- C. KINERJA LAINNYA**

**A. CAPAIAN  
KINERJA  
ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan adalah sebesar 109,24.**

**GRAFIK 3.1**  
NKO KPPN Painan 2016 s.d 2020



*Nilai Kinerja  
Organisasi KPPN  
Painan  
Tahun 2020*

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, NKO Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2018, Nilai Kinerja Organisasi KPPN Painan mengalami penurunan. Tetapi seluruhnya telah berstatus hijau yang artinya masih mencapai target. Capaian IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.1.

**TABEL 3.1**  
Capaian IKU Kemenkeu Three KPPN Painan Tahun 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Learning and Growth (100.00)								<b>109.24</b>
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal								109.24
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88.00	98.93	Maximize	Proxy Low	19.00%	7.20%	112.41
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99.30	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	105.64
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74.00	78.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	105.41
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.00	92.69	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	106.53
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	102.04
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	101.94
8a-N	Nilai rata - rata hard competency pegawai	77.00	84.70	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	110.00
9.a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92.00	97.62	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	106.11
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81.00	91.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	112.35
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00	97.55	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	102.68
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	120.00
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	100.00
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80.00	95.80	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	119.75
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83.00	92.69	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	111.67
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80.00	99.42	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	120.00
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.55	4.97	Maximize	Exact Moderate	21.00%	7.95%	109.23
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.00	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	120.00
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	99.91	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	5.30%	100.51
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>								<b>109.24</b>

Capaian IKU  
KPPN Painan Tahun  
2020

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU KPPN Painan (18 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran Strategis 1:**

**Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3

Capaian IKU pada Sasaran Strategis *Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel*

## SS 1: Pengelola perbendaharaan yang akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88%	98,93%	112,42
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99,30	105,64
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	99,42	120

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**1a-CP** Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain:

- (1) Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, meliputi frekuensi revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus.
- (2) Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, meliputi penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyampaian LPJ Bendahara, dan dispensasi SPM.
- (3) Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, meliputi penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, dan retur SP2D.
- (4) Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, meliputi perencanaan kas dan kesalahan SPM.

Tujuan dari penerapan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 88%. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020 adalah 98,93%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2020 triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun 2020 dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1975/PB.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode

Triwulan II Tahun 2020, capaian IKU ini pada triwulan I dan II adalah N/A. Pada triwulan III dan IV telah dilakukan penilaian kembali terhadap IKPA. Realisasi pada triwulan III yaitu 99,43% dan realisasi pada triwulan IV yaitu 98,42% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

**TABEL 3.4**

Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L* Tahun 2020

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Maximize/ Average
Realisasi	N/A	N/A	N/A	99,43 %	99,43 %	98,42 %	98,93%	
Nilai Capaian	N/A	N/A	N/A	112,99	112,99	111,84	112,42	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 98,93% tersebut melampaui target IKU sebesar 88% dengan nilai capaian 112,42 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 97,68% sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 98,93%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 1,25%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.5.

**TABEL 3.5**

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L* Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	N/A	N/A	N/A	99,43 %	99,43 %	98,42 %	98,93 %	88%
2019	99,13 %	97,50 %	98,31 %	96,91 %	97,85 %	97,17 %	97,68 %	88%
Selisi h	N/A	N/A	N/A	2,52%	1,58%	1,25%	1,25%	8%

Realisasi pada tahun 2019 dan 2020 telah melewati batas target dan terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2020 pada setiap triwulannya dibandingkan capaian IKU tahun 2019.



*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Terdapat isu dalam pencapaian IKU tersebut yang perlu mendapat perhatian, yaitu Pemahaman Satker terkait pengelolaan keuangan negara yang rendah khususnya untuk Satker lingkup Kementerian Agama. Hal ini terjadi karena pejabat perbendaharaan merangkap sebagai fungsional guru sehingga Satker memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat mempelajari pengelolaan keuangan negara dibandingkan Satker lainnya.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Painan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. KPPN secara aktif melakukan pemantauan dan himbuan kepada Satker jika ditemukan adanya keterlambatan atau ketidaksesuaian yang ada pada komponen perhitungan melalui group whatsapp "Grup Diskusi KPPN Painan".
2. Melakukan pengawasan secara manual terhadap indikator yang ada agar tetap bernilai maksimal. Pengawasan yang telah dilakukan meliputi data kontrak, pengelolaan UP, LPJ, renkas, dan penyelesaian tagihan.
3. Secara berkala menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan pengajuan penggantian uang persediaan kepada Satker berdasarkan data OMSPAN.
4. Secara persuasif menyarankan kepada Satker agar melakukan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki capaian pada periode triwulanan.
5. Melakukan pembinaan terhadap Satker yang memiliki nilai IKPA yang rendah dengan melakukan kunjungan terhadap Satker tersebut untuk mengetahui akar masalah yang dialami oleh Satker terkait nilai IKPA tersebut.
6. Memberikan teguran tertulis kepada Satker yang terlambat menyampaikan data kontrak dan menyampaikan LPJ.
7. Memberikan penghargaan kepada Satker dengan nilai IKPA terbaik.
8. Menyampaikan hasil monitoring nilai IKPA setiap bulanan beserta langkah-langkah yang harus dilakukan Satker untuk meningkatkan IKPA.
9. Menyampaikan surat ke satker nomor S-393/WPB.03/KP.06/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang pengaturan penilaian IKPA Tahun 2020.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2020, yaitu:

1. Penguatan fungsi pembinaan Satker melalui FGD, kunjungan, bimbingan teknis terbatas dengan Satker yang terus menerus melakukan kesalahan atau keterlambatan atas komponen perhitungan IKU.
2. Menyampaikan ketentuan terkait pelaksanaan anggaran kepada Satker melalui surat dan melakukan update informasi melalui WAG KPPN, website

3. Melakukan monev pelaksanaan anggaran pada Satker yang mempunyai proyek-proyek strategis.

**1b-  
N** Nilai kualitas LK  
Kuasa BUN  
KPPN

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN** merupakan IKU yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN. Selain itu juga untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel. KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut agar dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dengan formula sebagai berikut:

***Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan***

*Target tahun  
2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah nilai 94. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi tahun  
2020*

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas dihitung berdasarkan hasil penilaian LK Kuasa BUN KPPN tahun 2019. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 99,30.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Terjadi penurunan capaian IKU Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,6%. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 99,36. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 99,30.

**TABEL 3.6**

Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Tahun	Realisasi						Tahun	Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV		
2020	-	-	-	-	-	-	99,30	94
2019	-	-	-	-	-	-	99,36	94
Selisi h	-	-	-	-	-	-	-0,6%	1

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.7.

**TABEL 3.7**

Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahun	Pol /KP
Target KK	-	-	-	-	-	-	94	Maximize/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	-	99,30	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	-	105,64	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7, nilai realisasi tahunan melampaui target IKU. Dari target sebesar 94, realisasi mencapai nilai 99,30 dengan nilai capaian 105,70 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan pada tahun 2020.

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Penyusunan LK UAKBUN saat ini menjadi lebih sederhana terbukti dengan semakin berkurangnya lampiran yang dibutuhkan dalam Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN. Sebagai contoh, sebelumnya pada penyusunan LK UAKBUN semua produk yang dihasilkan dari SPAN misalnya LO, LPE dan berbasis Kas LRA Face, LRA Detail, LRA Ikhtisar, dsb dilampirkan di dalam komponen LK UAKBUN. Saat ini hal LK UAKBUN tingkat KPPN hanya menjelaskan posisi Laporan Arus Kas dan Neraca sehingga sulit untuk mengetahui kondisi capaian realisasi yang dilihat melalui LRA. Selain itu adanya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) atas hasil rekonsiliasi yang menyebabkan Laporan Keuangan menjadi kurang akurat serta masih adanya TDK atas hasil rekon disebabkan Satker belum secara maksimal memanfaatkan menu pada aplikasi E-Rekon. Satker hanya melakukan proses upload ADK rekon tanpa menganalisa hasil rekon maupun hasil validasi transaksi berupa pagu minus sampai pada 6 digit akun. Selain itu masih terdapat saldo tidak normal, persediaan dan aset belum diregister pada beberapa satker, sehingga berdampak pada kualitas LK UAKBUN yang disusun oleh KPPN. Adanya temuan berupa PAGU MINUS pada rincian akun 6 digitnya, sementara apabila dilihat pagu 2 digit pada akun tersebut belum minus dan kurangnya pemahaman dari satker mengenai pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawabannya

Untuk mengurangi risiko adanya temuan saat dilakukan rekonsiliasi yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan maka KPPN telah melaksanakan mitigasi dengan cara :

1. mengintensifkan koordinasi dengan satker melalui sarana WAG
2. melakukan monitoring pada aplikasi e-rekon&LK secara periodik
3. melakukan pembinaan langsung ke beberapa satker dalam rangka edukasi penyusunan laporan keuangan terhadap satker-satker yang bermasalah.

Untuk meningkatkan kualitas LKUAKBUN 2020 maka KPPN Painan telah memiliki beberapa rencana Aksi:

1. Lebih intensif untuk melakukan monitoring pada aplikasi e-Rekon&LK.
2. Lebih intensif untuk mengajak satker agar melakukan rekonsiliasi di awal periode rekon sehingga jika terjadi perbedaan masih ada waktu untuk menyelesaikan.
3. Melakukan pembinaan ke satker yang masih memiliki permasalahan.

**1c-CP** Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau perkiraan pendapatan bulanan, RPD harian, dan perkiraan pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.

PPDH (PPDH) adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

#### Target tahun 2020

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2020 dengan target 80%. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

#### Realisasi tahun 2020

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah 99,42%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase akurasi perencanaan kas KPPN setiap triwulannya. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun 2020 dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-3000/PB.1/2020 tanggal 01 Oktober 2020 hal Pengelolaan Kinerja DJPb Periode Triwulan III Tahun 2020, capaian IKU pada triwulan I, III, dan IV adalah N/A. Sedangkan realisasi pada triwulan II yaitu 99,42% dan realisasi pada triwulan IV yaitu 98,42% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8.

**TABEL 3.8**

Capaian IKU Persentase akurasi perencanaan kas KPPN Tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	<i>Maximize/Average</i>
Realisasi	N/A	99,42%	99,42%	N/A	99,42%	N/A	99,42%	
Nilai Capaian	N/A	120	120	N/A	120	N/A	120	

#### Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,42% melampaui target IKU sebesar 80% dengan nilai capaian 120 yang

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Tidak terjadi perubahan capaian pada Tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru.

TABEL 3.9

Perbandingan Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

Tahun	Realisasi						Tahun	Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV		
2020	-	-	-	-	-	-	99,42 %	80%
2019	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisi h	-	-	-	-	-	-	-	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Akurasi perencanaan kas KPPN merupakan IKU baru pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2019 terdapat kebijakan PPDH. Dengan kebijakan ini, Satker diwajibkan untuk menyampaikan rencana pencairan setiap harinya melalui aplikasi SPRINT. Rencana pencairan merupakan pagu pencairan tertinggi Satker tersebut ke KPPN dalam satu hari.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan bimtek ke Satker perihal sosialisasi update aplikasi RPD Harian yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat kepala KPPN Painan nomor UND-13/WPB.03/KP.06/2020 tanggal 25 September 2020.
  2. Menyampaikan surat pemberitahuan ke satker perihal langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran belanja dan program PEN serta penegasan SPM tanpa RPD harian ke KPPN
  3. Pemberian dispensasi penyampaian RPD Harian SPM DAK Non Fisik untuk dana BOS
  4. Pemberian dispensasi penyampaian RPD untuk penyaluran DAK Fisik Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan COVID-19
  5. Pemberian dispensasi penyampaian RPD atas SPM terkait penyaluran Dana Desa
  6. Secara berkala menyampaikan laporan ke Kanwil DJPb Sumbar terkait laporan akurasi rencana penarikan dana KPPN per periode
- Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Membuat surat teguran kepada Satker yang tidak menyampaikan RPD atau terdapat perbedaan antara RPD dengan realisasinya.
2. Membuat surat penegasan terkait penyampaian RPD ke KPPN.

**2. Sasaran Strategis 2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

**TABEL 3.10**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

**SS 2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)	4,97 (skala 5)	109,23

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**2a-N** Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN** merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. IKU ini diukur mengacu kepada tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 4,55 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,53. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi tahun 2020*

Hasil survey menunjukkan bahwa KPPN Painan memiliki capaian indeks kepuasan pada tahun 2020 yakni sebesar 4,97. Adapun rincian capaian indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11.

**TABEL 3.11**

Rincian Capaian Indeks Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN

No	Aspek Layanan	Capaian 2020
1	Pencairan Dana	4,96
2	layanan bimbingan dan konsultasi	4,98
3	konfirmasi surat setoran	4,94
4	penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran	4,98
5	Sarana dan Prasarana	5
Rata Rata		4,97

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2020 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.12.

**TABEL 3.12**

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	-	4,55	Maximize/ Take last known value
Realisasi	-	-	-	-	-	-	4,97	
Nilai capaian	-	-	-	-	-	-	109,23	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, nilai realisasi tahunan IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2020 yakni tercapai sebesar 4,97 dari target sebesar 4,55 sehingga menghasilkan angka capaian sebesar 109,23.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,7%. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 4,90. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 4,97.

**TABEL 3.13**

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2020

Tahun	Realisasi						Tahun	Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV		
2020	-	4,97	4,97	-	4,97	-	4,97	4,55



2019	-	4,90	4,90	-	4,90	-	4,90	4,53
Selisi h	-	0,7%	0,7%	-	0,7%	-	0,7%	0,02

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Upaya peningkatan layanan yang dihasilkan KPPN Painan sudah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai KPPN untuk meningkatkan citra baik KPPN Painan sebagai ujung tombak pengelola APBN di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan seperti perbaikan sarana dan prasarana layanan, peningkatan koordinasi dengan satker mitra kerja, penggunaan sarana informasi terkini untuk percepatan tersampainya informasi layanan KPPN misal melalui penggunaan grup whatsapp. Pengalihan web KPPN menjadi terintegrasi dengan web Kantor Pusat dan Kanwil DJPb juga membantu dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Hal ini karena penggunaan *microweb* tersebut merupakan bentuk standardisasi web KPPN dengan fitur, menu, dan *updating* informasi yang lebih lengkap. Hasil survey diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail tentang layanan apa yang seharusnya menjadi bahan perbaikan bagi KPPN.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil identifikasi terhadap kekurangan layanan di KPPN Painan diantaranya :

1. Meningkatkan kebersihan ruang layanan dengan cara penyediaan tempat sampah tambahan, penyediaan checklist kebersihan ruangan di ruang layanan serta penerapan *clean desk* di meja layanan.
2. Usulan belanja modal tahun anggaran 2020 salah satunya adalah penyediaan A.C Split Ukuran 1 PK sebanyak 2 unit yang akan difungsikan pada ruang Front Office.
3. Implementasi WBK/WBBM dan SMM ISO 9001 : 2015 pada tahun 2020.
4. Penambahan fasilitas ruang bermain anak, parkir khusus difabel, dan fasilitas lainnya yang mendukung implementasi PUG
5. Meningkatkan layanan pencairan dana dengan memberitahukan Satker atas penolakan SPM, SKPP, atau kontrak melalui sarana tercepat yaitu Whatsapp Grup Diskusi KPPN Painan dan SMS Gateway.
6. Melaksanakan Gugus Kendali Mutu untuk memastikan layanan KPPN sesuai dengan KEP-650/PB/2018

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu: Melengkapi setiap objek yang menjadi bagian dari pelaksanaan WBK / WBBM dan SMM ISO 9001 : 2015. Hal ini diharapkan berdampak kepada peningkatan kualitas layanan sehingga berpengaruh kepada tingkat kepuasan satker di tahun 2021,

Meningkatkan kualitas personal petugas layanan, dan memaksimalkan ruang yang ada untuk memenuhi fasilitas layanan.

**2b-  
N** Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder .

*Target tahun 2020*

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2020 dengan target indeks 3. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah 4. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas setiap triwulannya. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun 2020, capaian IKU pada triwulan I adalah N/A. Sedangkan realisasi pada triwulan II, III dan IV yaitu 4 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

**TABEL 3.14**

Capaian IKU indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	3	3	3	3	3	3	3	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	N/A	4	4	4	4	4	4	
Nilai Capaian	N/A	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4 melampaui target IKU sebesar 3 dengan nilai capaian 120 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Tidak terjadi perubahan capaian pada Tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru.

**TABEL 3.15**

Capaian IKU indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas Tahun 2020

Tahun	Realisasi						Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	
2020	N/A	4	4	4	4	4	3
2019	-	-	-	-	-	-	-
Selisi h	-	-	-	-	-	-	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Mekanisme pendaftaran supplier belum sepenuhnya dipahami oleh petugas Satker sehingga terjadi retur yang disebabkan oleh kesalahan nomor rekening, nama penerima atau rekening penerima pasif. Hal ini terjadi karena Data dukung yang memuat nomor dan nama pemilik rekening yang tidak terstandarisasi dari Bank (Surat Keterangan Referensi, Mutasi Rekening, Buku Tabungan, Rekening Koran, dll), ketidaktelitian Satker dalam menginput data supplier.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Melakukan monitoring dan menyampaikan surat pemberitahuan retur kepada Satker serta melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum ditindaklanjuti oleh Satker.
2. Meminta bukti fotocopy buku rekening/rekening koran penerima yang berisi informasi nomor, nama rekening dan transaksi terakhir untuk memastikan rekening aktif/pasif.  
Melakukan koordinasi via telepon terhadap retur yang belum ditindaklanjuti oleh Satker.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Untuk data supplier baru, Satker diminta untuk melampirkan rekening koran yang jelas (tidak diperkenankan melampirkan surat referensi bank maupun mutasi rekening) sebagai perbandingan data
2. Petugas Front Office dan Petugas Validator lebih teliti memeriksa penulisan nomor dan nama pemilik rekening pada SPM, dan khusus Petugas Validator agar meneliti referensi Bank pada ADK BCSR yang akan diupload.

3. Mengimbuu kepada Satker agar menekankan pentingnya validasi rekening dari Bank sebagai data dukung SPM.

**3. Sasaran Strategis 3:**

**Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal**

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

**TABEL 3.16**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

**SS 3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,91%	100,51

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**3a-N** Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.

- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, KONtrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure.

#### Target tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 99,40% dengan periode pelaporan triwulanan. Target tersebut tidak mengalami perubahan dengan target 2019. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

#### Realisasi tahun 2020

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah 99,91%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu setiap triwulannya. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun, capaian IKU pada triwulan I adalah N/A. Sedangkan realisasi pada triwulan II, III, dan IV yaitu 99,82%, 99,91% dan 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

TABEL 3.17  
Capaian IKU persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40%	Max/ Average
Realisasi	N/A	99,82 %	99,82 %	99,91 %	99,87 %	100%	99,91%	
Nilai Capaian	N/A	100,42	100,42	100,51	100,47	100,60	100,51	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,91% melampaui target IKU sebesar 99,40% dengan nilai capaian 100,51 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,19%. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 99,72. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 99,91.

TABEL 3.18

Perbandingan Capaian IKU persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	N/A	99,82 %	99,82 %	99,91 %	99,87%	100 %	99,91 %	99,40%
2019	99,36 %	99,50 %	99,43 %	100%	99,62%	100 %	99,72 %	99,40%
Selisi h	-	0,32%	0,39%	- 0,09%	0,25%	-	0,19%	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Perubahan mekanisme pengajuan SPM oleh Satker yang semula secara tatap muka saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SPM. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa penyesuaian baik dari segi Satker maupun internal KPPN. Banyak waktu yang digunakan oleh Seksi PDMS untuk mengatasi permasalahan yang timbul maupun menjawab konsultasi Satker via telepon maupun WhatsApp, sehingga penyelesaian SP2D menjadi terhambat. Adanya pegawai yang melaksanakan WFH secara bergantian berdampak pada ritme kerja di kantor, mengingat sebagian besar pekerjaan Seksi PDMS khususnya penerbitan SP2D harus dilakukan di kantor.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah :

1. Memastikan kesesuaian/kebenaran kelompok bayar sesuai bank penerima pada permintaan proses pembayaran
2. Segera memproses daftar tagihan dan meminimalisir SP2D void/pembatalan SP2D.
3. Memastikan proses pembayaran tepat waktu.

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi pada periode selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan sinergi antara seksi PD dan seksi Bank.
2. Mempertahankan strategi *by pass hardcopy* dokumen dari petugas validator kepada Kasi PDMS.
3. Meningkatkan kepedulian dan *awareness* pada masing-masing pegawai terhadap pentingnya IKU penyelesaian SP2D secara tepat waktu.

**4. Sasaran Strategis 4:**

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk

**Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan**

memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan

edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**TABEL 3.19**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan

**SS 4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	<b>Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi</b>	87	92,69	106,54

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

4a-N

**Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah**

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 87. Target IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah semesteran, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

*Realisasi tahun 2020* Realisasi IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2020 adalah indeks 92,69. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi setiap semesternya. Realisasi semester I dan semester II secara berturut-turut adalah 92,29 dan 93,08 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.20.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

TABEL 3.20

Realisasi capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	87	87	-	87	87	87	Max/ Average
Realisasi	-	92,29	92,29	-	92,29	93,08	92,69	
Nilai Capaian	-	106,08	106,08	-	106,08	106,99	106,54	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.20, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU di atas mencapai 99,42 dengan nilai capaian 106,54 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan 2019*

Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 88,75 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 92,69 Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 3,94%. Perbandingan antar semester capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.21.

TABEL 3.21

Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	-	92,29	92,29	-	92,29	93,08	92,69	87
2019	-	91,4	91,4	-	91,4	86,11	88,75	86
Selisih	-	0,89	-0,89	-	0,89	6,97	3,94	1

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Permasalahan utama dalam ketercapaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2020 adalah Ruang aula KPPN sangat terbatas sebagai tempat penyelenggaraan sosialisasi / bimtek. Jika kegiatan sosialisasi / bimtek harus dihadiri perwakilan 2 orang per satker, sosialisasi terpaksa dilaksanakan dengan jadwal dua shift yakni pagi dan siang sehingga mengurangi tingkat kenyamanan peserta sosialisasi / bimtek.



Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Memaksimalkan persiapan sarana dan prasarana kegiatan.
2. Menyelenggarakan sosialisasi/bimtek secara tepat waktu.
3. Melaksanakan rapat internal terkait persiapan penyelenggaraan kegiatan.

Rencana yang akan dilakukan kedepannya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan sosialisasi/bimtek berdasarkan hasil evaluasi/masukan dalam kuesioner periode sebelumnya.

**5. Sasaran Strategis 5: Pengelolaan kas yang pruden dan optimal**

Pengelolaan kas yang optimal artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan idle cash dengan hasil yang maksimal, meminimalisir cost dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Sedangkan pruden dan optimal dalam pengelolaan kas negara berarti kemampuan dalam mengelola kas negara dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

**SS 5: Pengelolaan kas yang pruden dan optimal**

**TABEL 3.22**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang pruden dan optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%	102,04

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**5a-N** Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

LPJ Bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2020 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Desember 2019, bulan Januari dan Februari tahun 2020. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2020 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Maret, April dan Mei tahun 2020 dan seterusnya.

#### Target tahun 2020

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah nilai 98%. Target IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memiliki target 97,50%.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

#### Realisasi tahun 2019

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu setiap triwulannya. Setiap triwulannya IKU ini memiliki realisasi 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23.

**TABEL 3.23**

Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahun	Pol /KP
Target	98 %	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Maximize/ Average
Realisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Nilai Capaian	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	

#### Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut melampaui target IKU sebesar 98% dengan nilai capaian 102,04 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

#### Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 dengan tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.24. Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 99,78% sedangkan pada

*tahun  
sebelumnya*

tahun 2020 realisasi IKU mencapai 100%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,22%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.24.

**TABEL 3.24**

Perbandingan Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
2019	99,12 %	100%	99,56 %	100%	99,71 %	100%	99,78 %	97,50%
Selisi h	0,88%	-	0,44	-	0,29	-	0,22%	0,5%

Realisasi pada tahun 2019 dan 2020 telah melewati batas target dan terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2020 pada setiap triwulannya dibandingkan capaian IKU tahun 2019.

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Yang menjadi ISU utama adalah Ada tenggang waktu yang cukup lama antara penyampaian ADK LPJ ke SPRINT dengan penyampaian hardcopy LPJ beserta kelengkapannya sehingga menyulitkan bagi KPPN untuk melakukan verifikasi terhadap LPJ berkenaan sehingga Akan menyebabkan proses approve terganggu, dan bahkan jika LPJ beserta kelengkapannya tidak diterima oleh KPPN berisiko untuk tidak disetujui dan KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan Pengenaan Sanksi (SP2S) yang sudah pasti akan berimplikasi pada tidak optimalnya pencapaian target IKU Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN secara Andal dan Tepat Waktu.

Kurangnya pemahaman satker terhadap Perdirjen nomor 3/PB/2013 tentang pertanggungjawaban bendahara juga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Bendahara Mitra kerja KPPN Painan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 adalah KPPN Painan membuat inovasi dalam memberikan kemudahan bagi satker untuk menyampaikan softcopy LPJ beserta kelengkapan dokumennya melalui email yang sudah dibuat khusus sehingga KPPN dapat melakukan verifikasi dengan mudah dan cepat. Email ini sudah diberitahukan kepada satker mitra kerja KPPN Painan.

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Pembinaan secara intensif bagi satuan kerja yang mengalami masalah terkait LPJ bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran baik secara langsung melalui CSO maupun secara tidak langsung melalui grup *whatsapp* diskusi satker mitra KPPN Painan.
2. Memberikan edukasi ke satker mengenai PER-3/PNB/2013
3. Mengajak satker untuk mau mengirimkan LPJ sebelum awal bulan berikutnya agar masih tersedia waktu jika terdapat perbedaan data yang harus ditindaklanjuti.

#### 6. Sasaran Strategis 5:

#### Monev perbendaharaan

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.24.

**TABEL 3.24**  
Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis  
Monev  
perbendaharaan

#### SS 6: Monev Perbendaharaan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	80	99,64	120
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	94	99,30	105,64

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

#### 6a-CP

Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian

kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA).

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 80. Target IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 5 dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU ini pada tahun 2020 adalah 99,64. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa setiap triwulan. Realisasi pada triwulan I, II, III dan IV yaitu 100, 98,55, 100, 100 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25.

**TABEL 3.25**

Capaian IKU Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada tahun 2020

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	80	80	80	80	80	80	80	Max/ Average
Realisasi	100	98,55	99,28	100	99,51	100	99,64	
Nilai Capaian	120	120	120	125	124,39	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,64 melampaui target sebesar 80 dengan nilai capaian 120 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain

itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya*

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 dengan tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.26. Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 97,35 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 99,64. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 2,29%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.26.

TABEL 3.26

Perbandingan Capaian IKU Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2020 dan 2019

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	100	98,55	99,28	100	99,51	100	99,64	75
2019	95	96,63	95,82	99,14	96,92	98,63	97,35	80
Selisi h	5	1,92	3,46	0,86	2,59	1,37	2,29	5

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

KPPN Painan hanya memiliki 1 mitra penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja. Dengan kondisi lokasi yang berdekatan antara KPPN dan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan sangat memudahkan koordinasi dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan kooperatif dalam pemenuhan persyaratan penyaluran sehingga tidak pernah terlambat dalam melebihi batas waktu penyampaian dokumen DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN selaku penyalur selalu menyalurkan tepat waktu maksimal 7 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh KPPN.

Penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang merupakan kewajiban KPPN kepada Koordinator Dit PA juga disampaikan secara tepat waktu tidak melewati batas waktu yang ditentukan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran Dana Desa.
2. KPPN Painan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa yang sudah disalurkan triwulan I, II, III dan IV
3. KPPN Painan telah melaksanakan FGD Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa.

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah via *Whatsapp* maupun telepon.
2. Menyampaikan LK UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN tepat waktu.

**6b-CP** Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2020, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

- a. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2020 secara tepat waktu.
- b. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2020.

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 100%. Target IKU tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2020 adalah 100%. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun 2020, capaian IKU ini pada triwulan I adalah N/A. Realisasi pada triwulan II, III, dan IV adalah 34%, 63% dan 100%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

**TABEL 3.27**

Realisasi capaian IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	20%	34%	34%	60%	60%	100%	100%	Max/ Average
Realisasi	N/A	34%	34%	63%	63%	100%	100%	
Nilai Capaian	N/A	100	100	105	105	100	100	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.27, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% mencapai target dengan nilai capaian 100 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 dengan tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.28. Realisasi IKU pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 100%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.28.

**TABEL 3.28**

Perbandingan Capaian IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi						Tahun	Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV		
2020	N/A	34%	34%	63%	63%	100%	100%	100%
2019	6%	28%	28%	69%	69%	100%	100%	100%
Selisi h	N/A	6%	6%	-6%	-6%	-	-	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Pengukuran IKU Persentase Tingkat Implementasi SAKTI untuk KPPN Painan mengacu kepada setiap kegiatan tahapan implementasi SAKTI yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendaftaran email kedinasan domain @sakti.mail.go.id (Tahap I).
2. Set up konfigurasi satker dan pendaftaran user SAKTI (Tahap I).
3. Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPAK.
4. Refreshment training SAKTI tahun 2020 (SAKTI Web dan Desktop).
5. Pendampingan pelaksanaan Revisi DIPA 2020.
6. Publikasi Tahap I implementasi SAKTI Web.
7. FGD/Sosialisasi Tahap I implementasi SAKTI Web (SAKTI Web full Modul).
8. Pelaksanaan Training Tahap I SAKTI Web (Modul Penganggaran / implementasi redesign Penganggaran) seluruh Satker KL.
9. Pendampingan penyusunan RKAKL/DIPA 2021.
10. Pendampingan Implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan)



11. Pendampingan penyusunan DIPA TA 2021 (RSPP).
12. Publikasi Tahap II implementasi SAKTI Web Full Module (Modul Pelaksanaan dan Modul Pelaporan) kepada satker di luar peserta Piloting SAKTI Tahap I sd V.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan KPPN Painan pada tahun 2021 adalah Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Menentukan PIC untuk setiap kegiatan yang disusun agar berjalan dengan lancar dan terarah adalah Melakukan percepatan implementasi aplikasi SAKTI untuk Satker yang menjadi piloting pada tahap berikutnya. Percepatan tersebut berupa pelaksanaan FGD, flyer dan sosialisasi.

#### 7. Sasaran Strategis 7:

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.29.

**TABEL 3.29**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

#### SS 7: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**7a-  
N** Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAkkBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 98,1%. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2020 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu setiap triwulannya. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-466/PB/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan s.d. Bulan Mei 2020, capaian IKU ini pada triwulan II adalah N/A. Realisasi pada triwulan I, III dan IV yaitu 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2019*

**TABEL 3.30**

Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	Max/Average
Realisasi	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	

Nilai Capaian	101,94	N/A	101,94	101,94	101,94	101,94	101,94	
---------------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% melampaui target IKU sebesar 98,1% dengan nilai capaian 101,94 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2020 dengan tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.31. Realisasi IKU pada tahun 2019 dan 2020 adalah 100%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.31.

**TABEL 3.31**

Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	98,1%
2019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,1%
Selisi h	-	N/A	-	-	-	-	-	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Sesuai dengan nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-466/PB/2020 tanggal 24 Juni 2020, KPPN selain melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan satker, juga melakukan konfirmasi atas capaian Output yang telah diinput oleh satker. Kondisi ini menyebabkan fokus pekerjaan menjadi terbelah, dan menambah waktu dalam melakukan analisa, karena KPPN khususnya seksi Veraki juga harus melakukan analisa atas capaian output tersebut. Kondisi ini bisa jadi penghambat satker untuk upload adk rekon, karena capaian output belum input, atau waktu analisa yang semakin panjang. Atas kondisi ini diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara Seksi PDMS dan Seksi Veraki. Selain permasalahan tersebut, masih ditemukan satker yang kurang memahami makna rekonsiliasi internal dan eksternal, karena terkadang satker sudah upload adk rekon walaupun rekonsiliasi internal belum dilakukan, sementara itu ada juga satker yang upload ADK rekonsiliasi di periode akhir masa

rekon (H-1). Kondisi ini terus diupayakan untuk diperbaiki dengan memberikan edukasi dan pemahaman ke satker.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan jadwal buka tutup E-rekon ke pada satker melalui website KPPN Painan dan grup Whatsapp "Diskusi KPPN Painan" apabila pelaksanaan E-Rekon pada tahun 2020 sudah dimulai sehingga dipastikan seluruh satker terinformasikan perihal jadwal E-Rekon.
2. Konsultasi ke Hai DJPb terkait permasalahan rekon yang penanganannya tidak dapat dilakukan oleh Vera-Ki, maupun CSO KPPN
3. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Sakter yang masih belum melakukan upload data E-Rekon dengan melakukan komunikasi secara aktif serta kunjungan ke Satker yang bersangkutan.
4. Melakukan pembinaan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke Satker yang rekonsiliasinya bermasalah.

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah:

1. Semakin meningkatkan koordinasi dengan satker dalam rangka menghibau satker untuk upload ADK rekon sebelum H-5 sehingga masih ada waktu untuk perbaikan
2. Memberikan edukasi atas permasalahan yang dialami satker.

**8 Sasaran Strategis 8:**

**Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal**

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.32.

**SS 8: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal**

**TABEL 3.32**  
Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai	77	84,7	110
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	95,8	119,75
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	83	92,69	111,67
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	78	105,41

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**8a-N** Nilai rata – rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 77. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2019.

*Target IKU  
Tahun 2020*

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi IKU  
Tahun 2020*

Nilai rata – rata *hard competency* pegawai dihitung berdasarkan nilai rata-rata pelaksana yang mengikuti *hard competency*. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 84,7.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.33.

**TABEL 3.33**  
Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	77	77	Maximize/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	84,7	84,7	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	110	110	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33, nilai realisasi tahunan melampaui target IKU. Dari target sebesar 77, realisasi mencapai nilai 84,7 dengan nilai capaian 110 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan pada tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Terjadi penurunan capaian IKU Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,47%. Pada tahun 2019, realisasi mencapai 87,17. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 84,7.

**TABEL 3.34**  
Perbandingan Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	-	-	-	-	-	-	84,7	77
2019	-	-	-	-	-	-	87,17	77
Selisi h	-	-	-	-	-	-	-2,47%	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Upaya peningkatan nilai rata rata *hard competency* pegawai KPPN Painan telah dilaksanakan dalam bentuk Dialog Kinerja Organisasi, *Morning Call*, *Sharing Session* internal, Gugus Kendali Mutu dan Mutasi Internal Pegawai. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas *hard competency* pegawai. Perkembangan saat ini sudah ada kemajuan dari beberapa pegawai khususnya dalam kegiatan penyampaian satu informasi positif setiap hari Senin dan Kamis dalam kegiatan *morning call* rutin yang diselenggarakan KPPN Painan mulai pukul 07.30 s.d. 07.45 WIB.

Perkembangannya adalah, beberapa pegawai yang selama ini cenderung untuk tidak mau menyampaikan informasi positif, saat ini secara perlahan sudah lebih maksimal. Hal tersebut membuktikan adanya usaha dari masing masing pegawai

untuk menambah wawasannya sehingga mampu menyampaikan satu informasi positif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Hard Competency tersebut, yaitu telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah Dialog Kinerja Organisasi dan Individu, Penerapan Coaching dan Counseling yang selaras dengan penerapan salah satu IKU Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan, Morning call secara rutin hari Senin dan Kamis, GKM pengembangan kompetensi pegawai.

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi adalah :

*Transfer Knowledge* secara berkesinambungan khususnya terhadap pegawai yang dimutasi internal, penjadwalan informasi positif dengan tema yang berkaitan dengan peningkatan hard competency seperti wawasan terkait Visi Misi, Indikator Kinerja Utama maupun SOP ataupun perkembangan terbaru terkait Ditjen Perbendaharaan. Selain itu masing-masing seksi dapat dijadwalkan pertemuan rutin bulanan untuk membahas tema terkini terkait tugas dan fungsinya.

**8b-N** Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%)

*Target IKU Tahun 2020*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2020 adalah 80. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode bersangkutan).

*Realisasi IKU Tahun 2020*

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2020 adalah 95,80.

TABEL 3.35

Perhitungan IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2020

Nilai & Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,80	95,80

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.36.

TABEL 3.36

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2020

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	PoI /KP
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max/ TLNV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,83	95,83	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Terbitnya beberapa aturan baru seperti KMK 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, ND-193/PB.1/2020 hal Pemantauan Kode Etik tahun 2020, mengharuskan Seksi VeraKi untuk langsung menyesuaikan. Sharing knowledge juga disampaikan ke internal KPPN Painan, selain itu diskusi dan koordinasi dengan wilayah juga selalu dilakukan.

Target IKU ini ada di triwulan IV, nilai hasil evaluasi merupakan nilai atas evaluasi tugas KI periode Januari sampai dengan Desember.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Berupaya untuk menyelesaikan semua laporan KI di awal bulan berikutnya
2. Selalu berkoordinasi dengan kantor wilayah jika menemukan permasalahan
3. Mengaktifkan forum diskusi seksi

Rekomendasi rencana aksi periode selanjutnya :

1. Menjalankan strategi yang telah dilaksanakan selama ini
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor wilayah ataupun dengan KPPN lain jika menemukan permasalahan
3. Lebih mengintensifkan forum diskusi seksi

**9b-N** Nilai kualitas pengelolaan kinerja

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen



**berbasis  
Strategy  
Focused  
Organization**

Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization (SFO)*. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III dan nilai NKO Unit periode tahunan 2019.

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diformulasikan sebagai berikut:

***“Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan”.***

*Target IKU  
Tahun 2020*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* Kepala KPPN Painan Tahun 2020 adalah 83. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)*.

*Realisasi IKU  
Tahun 2020  
Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019*

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2020 adalah 92,01.

**TABEL 3.37**

Perhitungan IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2020

Unsur Pemenuhan Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja	Nilai	Realisasi IKU s.d. Trw IV
Pemenuhan Langkah Langkah Peningkatan	92,69	92,01

Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 70%)		
NKO (bobot 30%)	90,42	

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun sebelumnya*

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.38.

**TABEL 3.38**

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	83	83	<i>Take Last Known Value</i>
Realisasi	-	-	-	-	-	86,98	86,98	
Capaian	-	-	-	-	-	104,80	104,80	

Capaian IKU tersebut tahun sebelumnya (2019) adalah 86,98 sedangkan pada tahun 2020 adalah 92,01. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2020 sebesar 5,03 poin. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.39.

**TABEL 3.39**

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern tahun 2019 dan tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y
Target 2019	-	-	-	-	-	-	83
Realisasi 2019	-	-	-	-	-	-	86,98
Target 2020	-	-	-	-	-	-	81
Realisasi 2020	-	-	-	-	-	-	92,01

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Parameter Nilai IKU **Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization** ini adalah nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 dan nilai NKU Unit periode tahunan 2019. Sampai dengan saat ini KPPN Painan sedang menyusun Laporan SFO Triwulan III Tahun 2020 dengan mengacu pada Matriks Tahun 2020.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Melaksanakan setiap unsur pengelolaan kinerja yang terdapat didalam matrik Laporan SFO sesuai jadwal.

2. Membuat terobosan berupa penyediaan kalender pengelolaan kinerja KPPN Painan tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan pengelolaan kinerja selama tahun 2020.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan KPPN Painan adalah secara fokus perlu meningkatkan pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada periode berikutnya serta memperbaiki kualitas laporan Pengelolaan Kinerja berbasis SFO periode selanjutnya.

**8d-N** Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan

Program literasi perbendaharaan perlu untuk dilakukan penguatan terstruktur dan berkualitas yang diarahkan pada persiapan implementasi jabatan fungsional khususnya pada aktivitas pengembangan profesi yang meliputi:

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional atau internasional.
2. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian.
3. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang tidak dipublikasikan namun didokumentasikan di perpustakaan.
4. Menjadi pengajar/pelatih sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional.
5. Menjadi pembicara/peserta seminar/lokakarya/konferensi dalam bidang tugas jabatan fungsionalnya.
6. Menjadi pembicara/peserta delegasi ilmiah.
7. Pembuatan tulisan berupa opini pribadi yang dimuat koran lokal, nasional, maupun internasional.

Program literasi perbendaharaan perlu dilanjutkan dengan cakupan pejabat eselon III dan IV di Kanwil DJPb dan pejabat eselon IV di KPPN.

*Target tahun 2020*

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 74. Target IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 72.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Realisasi tahun 2020*

Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan dihitung berdasarkan hasil penilaian kantor pusat. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 78.

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2020

TABEL 3.40

Capaian IKU Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan Tahun 2020

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	-	-	-	-	74	74	Max/ Average
Realisasi	-	-	-	-	-	78	78	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	105,41	105,41	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 78 melampaui target IKU sebesar 74 dengan nilai capaian 105,41 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020.

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2020 dan  
tahun 2019

Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 89,25 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 78. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 11,25. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.41.

TABEL 3.41

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L*  
Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	-	-	-	-	-	78	78	74
2019	86	87	86,5	90	87,67	94	89,25	72
Selisi h	-	-	-	-	-	-16	-11,25	2

Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis. Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan *branding image* DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis. Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV. Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis/artikel oleh Tim Redaksi Kantor Pusat DJPb.

Akar masalah: Pengetahuan dan pengalaman dalam teknik penulisan yang masih perlu ditingkatkan.

Tindakan yang dilaksanakan KPPN Painan adalah

1. Pengenalan terkait budaya literasi (membaca dan menulis) melalui kesempatan *morning call*. hal ini diperlukan karena untuk mewujudkan sebuah karya tulis diperlukan wawasan yang hanya dapat dibentuk dari pengalaman dan minat baca.
2. Pengenalan terkait budaya literasi (membaca dan menulis) melalui kesempatan *morning call*. hal ini diperlukan karena untuk mewujudkan sebuah karya tulis diperlukan wawasan yang hanya dapat dibentuk dari pengalaman dan minat baca.
3. Telah diusulkan kegiatan bimtek/workshop terkait penulisan dengan narasumber dapat berupa wartawan, dosen atau narasumber lain di bidang penulisan dalam usulan Rakorwil Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan KPPN Painan adalah

1. Melibatkan Pejabat Eselon III dan eselon IV sebagai kontributor Website KPPN Painan.
2. Mengadakan kegiatan *One Week One Sentence* pada saat Do'a Bersama setiap hari Senin.

**9. Sasaran Strategis 9:**

**Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Barang Milik Negara yang dimiliki oleh suatu unit. Optimal adalah pengelolaan keuangan dan BMN dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

**TABEL 3.42**  
Capaian IKU pada  
Sasaran Strategis  
*Pengelolaan sarana  
dan TIK yang optimal*

**SS 9: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	103,69%	112,71
9b-N	Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	92%	103,69%	112,71
10a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	103,69%	112,71

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**9a-N** Persentase pengelolaan BMN yang Optimal

Pengelolaan BMN yang optimal diukur melalui beberapa komponen, sebagai berikut:

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (pelaksanaan pemanfaatan diukur sampe penerbitan SK sewa), Persentase pelaksanaan Alih Fungsi atas Rencana Penggunaan, dan persentase penghapusan atas rencana penghapusan.

2. Persentase completeness data master asset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Profil BMN penting untuk diisi lengkap pada master aset di aplikasi SIMAN. Profil BMN yang perlu dilengkapi untuk bangunan yaitu detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan), foto, batas dan GPS, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. Sedangkan untuk tanah

yaitu detail BMN (alamat, luas, pengguna), foto, batas dan GPS, dokumen, bangunan, pengelolaan, dan status hukum.

3. Persentase PNPB atas pengelolaan BMN

Diukur dari realisasi PNPB atas pengelolaan BMN dibandingkan dengan target pendapatan PNPB atas pengelolaan BMN. Data realisasi PNPB diambil dari Laporan realisasi pendapatan masing-masing unit.

4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN.

*Target IKU  
Tahun 2020*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2020 adalah 92. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

*Rrealisasi dan  
target tahun  
2020*

Perbandingan realisasi dan target IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar dapat ditunjukkan pada Tabel 3.43.

**TABEL 3.43**

Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-20	Pol /KP
Target	-	70%	70%	-	70%	92%	92%	Max / TLKN
Realisasi	N/ A	93,64 %	93,64 %	N/A	93,64 %	97,62	97,62	
Capaian	N/ A	120	120	N/A	120	106,11	106,11	

**TABEL 3.44**

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019 dan tahun 2020

*Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2020  
dan tahun  
sebelumnya*

Rincian IKU	Target	Capaian
Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN (2019)	92%	103,69%
Persentase pemenuhan BMN sesuai standar (2020)	92%	106,11%

Perbandingan Target dan Realisasi antara IKU pada tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.44. Terjadi kenaikan tingkat capaian pada tahun 2020 sebesar 2,31 poin.

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Penghitungan untuk IKU ini adalah Pelaksanaan RP4, Penginputan data di aplikasi SIMAN, dan Penyelesaian PSP. Pelaksanaan RP4 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan segala penambahan BMN telah diajukan PSP.

Namun terdapat kendala pada pengisian data master asset. Beberapa menu pada SIMAN tidak dapat dilakukan pengisian.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah :

1. Data SIMAN telah di-*update* sebisa mungkin.
2. Usulan PSP telah diajukan.
3. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMN telah dilaksanakan.

Rekomendasi Rencana Aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Apabila terdapat penambahan BMN, maka akan diusulkan PSP dan mengupdate data SIMAN.
2. Melakukan perawatan Sarana dan Prasarana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam pedoman mutu SMM ISO 9001 : 2015.

9b-N

Nilai kualitas  
LK tingkat  
UAKPA dan  
UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi: kriteria:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2. Keakuratan data laporan keuangan
3. Kepatuhan pelaksanaan anggaran
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Partisipasi dan
6. Laporan BMN.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2019 (70%).
2. Nilai NKO Unit periode tahunan 2018 (30%).



Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diformulasikan sebagai berikut:

**“Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan”**

Target IKU  
Tahun 2020

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2020 adalah 81. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan Average (realisasi yang digunakan adalah nilai rata-rata).

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2020

Perbandingan realisasi dan target IKU Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB dapat ditunjukkan pada Tabel 3.45.

**TABEL 3.45**  
Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-20	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	81	81	Max / Averag e
Realisasi	-	-	-	-	-	91	91	
Capaian	-	-	-	-	-	112,35	112,35	

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2020  
dan tahun  
sebelumnya

**TABEL 3.46**  
Perbandingan realisasi dan target tahun 2019 dan tahun 2020

Rincian IKU	Target	Capaian
Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB (2019)	95	98,86
Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB (2020)	81	91

Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah fokus dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III dan menyampaikan

Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Rekomendasi rencana aksi :

Menyiapkan data pendukung untuk kelengkapan Laporan Keuangan Tahun 2020.

9c-  
CP

**Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 60% komponen hasil dan 40% komponen proses.

*Target IKU Tahun 2020*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2020 adalah 95%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Average (realisasi yang digunakan adalah nilai rata-rata)*.

*Realisasi tahun 2020*

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2020 adalah 97,55%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata kualitas pelaksanaan anggaran KPPN tahun 2020 triwulanan. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1137/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan I Tahun 2020 dan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-1975/PB.1/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Periode Triwulan II Tahun 2020, capaian IKU ini pada triwulan I dan II adalah N/A. Pada triwulan III dan IV telah dilakukan penilaian kembali terhadap IKPA. Realisasi pada triwulan III yaitu 100% dan realisasi pada triwulan IV yaitu 95,09% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47.

*Perbandingan realisasi dan target tahun 2020*

Perbandingan realisasi dan target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dapat ditunjukkan pada Tabel 3.47.

**TABEL 3.47**  
Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-20	Pol /KP
Target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	95,09 %	97,55 %	Max / Average
Capaian	N/A	N/A	N/A	105,26	105,26	100,09	102,68	

*Perbandingan Realisasi IKU tahun 2020 dan tahun 2019*

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 97,55% tersebut melampaui target IKU sebesar 95% dengan nilai capaian 102,68 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Realisasi IKU pada tahun 2019 adalah 97,68% sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 98,93%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 1,25%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.48.

**TABEL 3.48**  
Perbandingan Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L*  
Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahun an
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	N/A	N/A	N/A	100%	100%	95,09 %	97,55 %	95%
2019	98,77 %	98,41 %	98,59 %	98,71 %	98,63 %	99,55 %	98,86 %	95%
Selisi h	N/A	N/A	N/A	1,29%	1,37%	- 4,46%	- 1,31%	-

*Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan*

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 60% komponen hasil dan 40% komponen proses.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 :

1. Percepatan realisasi belanja modal
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan berfokus pada pemenuhan capaian output, efisiensi dan penyerapan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi :

1. Meminta kepada masing-masing kepala Seksi untuk menyusun kembali rencana kegiatan untuk mempercepat capaian keluaran riil.
2. Menjaga konsistensi penyerapan anggaran sesuai dengan halaman III DIPA.
3. Menjaga nilai IKPA agar dapat mencapai nilai maksimal pada masing-masing indikator.

*Inisiatif Strategis  
KPPN Painan  
tahun 2020*

**Inisiatif Strategis KPPN Painan tahun 2020** diperlukan untuk membantu pencapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dan organisasi yang kondusif. Terdapat lima Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.49.

**TABEL 3.49**  
Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output / Outcome	Target Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN	Januari s.d Desember 2020	Selesai	Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, KPPN Painan telah melaksanakan transaksi belanja dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) seperti pembavaran biaya berlangganan zoom dan pembelian BBM.  Penggunaan KKP pada Satker lingkup KPPN Painan telah diimplementasikan oleh 8 Satker dengan 6 satker memiliki proporsi pagu UP tunai sebesar 60% dan 2 Satker memiliki proporsi pagu UP tunai melebihi 60%. Sehingga terdapat 75% Satker wajib KKP pada lingkup KPPN Painan yang memiliki besaran proporsi UP Tunai ≤ 60%.  Selain itu, setiap triwulan KPPN Painan telah menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP bagi Satker mitra kerja KPPN Painan.
2	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	Pelaksanaan Coaching and Counseling	Peningkatan kapasitas pegawai	Januari s.d Desember 2020	Selesai	Pelaksanaan Coaching and Counseling Triwulan I Tahun 2020 telah dilaksanakan pada Tanggal 02, 11, dan 12 Maret 2020 kepada 5 orang pegawai dengan menggunakan metode development. Sehingga Capaian pada Triwulan I memperoleh nilai 99,28%.  Pelaksanaan Coaching and Counseling Triwulan II Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 10, 16, 18, 19 Juni 2020 kepada 7 orang pegawai dengan menggunakan metode development dan memperoleh nilai 96,1%.

						<p>Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i> Triwulan III Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli, 15,16, dan 21 September 2020 kepada 8 orang pegawai dengan menggunakan metode development dan memperoleh nilai 100%.</p> <p>Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i> Triwulan IV Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 4, 7, 14, 16, 17, 18, 21 Desember 2020 kepada 8 orang pegawai dengan menggunakan metode development dan memperoleh nilai 99,72%.</p>
3	Monev Perbendaharaan	Pelaksanaan FGD DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dalam rangka kelancaran penyaluran dana desa	Semester I 2020	Selesai	<p>Rapat Koordinasi/FGD telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor Und-002/WPB.03/KP.0603/2020 dengan Peserta: KPPN, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan PPKB dengan materi persiapan penyaluran Dana Desa tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.</p> <p>Rapat Koordinasi/FGD telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Dinas Teknis Pengelola DAK Fisik Kabupaten Pesisir Selatan melalui aplikasi zoom membahas Percepatan Penyaluran DAK Fisik TA 2020 sesuai Undang-Undang Kepala KPPN Painan nomor Und-8/WPB.03/KP.0603/2020 Tanggal 19 Juni 2020.</p>
4	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Efisiensi atas belanja birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan	Tercapainya output kegiatan dengan penerapan efisiensi atas belanja birokrasi : (a)belanja bahan percetakan dan konsumsi; (b) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam; (c) RDK dan konsinyering Target :Minimal 10%	s.d Desember 2020	Selesai	<p>Efisiensi dilakukan terhadap akun belanja birokrasi yaitu belanja bahan percetakan dan konsumsi, belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam, serta RDK dan konsinyering. Jumlah pagu birokrasi sebesar Rp144.202.000 dan realisasi sebesar Rp120.919.047 dengan nilai efisiensi sebesar 21,04%.</p>

## LAIN-LAIN

Pada Capaian Kinerja Organisasi KPPN Painan tahun 2020, tidak seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2015-2019 dikarenakan keterbatasan jumlah IKU yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam setiap *refinement* Peta Strategi dan IKU Kepala KPPN tiap tahunnya tetap mengacu pada dokumen Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2020, Renja Ditjen Perbendaharaan, dan dokumen perencanaan lainnya.

**B. REALISASI  
ANGGARAN**

**1. Realisasi DIPA KPPN Painan tahun 2020**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi penyerapan DIPA KPPN Painan sebesar Rp1.442.846.093,- atau mencapai 95,81% dari total pagu sebesar Rp1.506.072.000,-

Seluruh kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2020, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 170.406.000,-(93,49%) dari pagu sebesar Rp 182.265.000,- , belanja barang mencapai sebesar Rp 920.263.693,-(94,74% dari pagu sebesar Rp 971.399.000,-, dan belanja modal sebesar Rp 352.176.400,-(99,93%) dari pagu sebesar Rp 352.408.000,-. Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2020 dan 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.50.

**TABEL 3.50**

Realisasi KPPN Painan Tahun Anggaran 2020 dan 2019 per Jenis Belanja

Jenis belanja	Tahun 2020		
	Pagu (Rp)	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	182.265.000	170.406.000	93.49
Belanja Barang	971.399.000	920.263.693	94.74
Belanja Modal	352.408.000	352.176.400	99.93
Jumlah	1.506.072.000	1.442.846.093	95.81

Jenis belanja	Tahun 2019		
	Pagu (Rp)	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	223.455.000	216.487.000	96.88
Belanja Barang	1.059.863.000	1.038.726.238	98.01
Belanja Modal	58.712.000	58.643.525	99.88
Jumlah	1.342.030.000	1.313.856.763	97.90

**2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA KPPN Painan TA 2020 per Kegiatan dan Output**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, pada tahun anggaran (TA) 2019 KPPN Painan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ini ditunjukkan pada Tabel 3.51 :

**TABEL 3.51**  
Realisasi DIPA KPPN Painan Tahun Anggaran 2020 per Output

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>08</b>	<b>Program: Pengelolaan Perbendaharaan Negara</b>			
<b>1705</b>	<b>Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara</b>	1.506.072.000	1.442.846.093	<b>95,81</b>
1705 002	Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah	37.933.000	25.248.925	66,56 %
1705 003	Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	6.926.000	2.714.400	39,19
1705 951	layanan internal (overhead)	352.408.000	352.176.400	99,93
1705 970	Layanan Perkantoran	41.576.000	40.009.400	96,23
1705 994	Layanan Perkantoran	1.067.229.000	1.022.696.968	96,32

*Analisis*

*Efisiensi  
Penggunaan  
n atas  
Sumber  
Daya*

**3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya**

Pada Masa Pandemi *Covid-19*, efisiensi belanja barang persediaan konsumsi dan belanja bahan sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan layanan *online e-spm* dimana KPPN harus mencetak SPM beserta lampiran bukti dukung, sehingga belanja supplies computer dan kertas tetap tinggi. Sementara pada belanja perjalanan dinas tidak banyak realisasi karena digantikan melalui *video conference* maupun media online lainnya. Pada tahun 2020 efisiensi pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai 9,21 dari aplikasi SMART.

CAPAIAN NILAI IKPA SATKER KPPN PAINAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2020

Nilai IKPA			100.00%
1	Pengelolaan UP	8%	8.00%
2	Data Kontrak	0%	0.00%
3	Kesalahan SPM	5%	5.00%
4	Retur SP2D	5%	5.00%
5	Hal III DIPA		
6	Revisi DIPA		
7	Penyelesaian Tagihan	0%	0.00%
8	Konfirmasi Capaian Output	10%	10.00%
9	Rekon LPJ	5%	5.00%
10	Renkas	0%	0.00%
11	Realisasi	15%	15.00%
12	Pagu Minus	5%	5.00%
13	Dispensasi SPM	5%	5.00%
Nilai IKPA			58%

CAPAIAN NILAI SMART SATKER KPPN PAINAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Indikator	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	95.80
2	Konsistensi	99.65
3	Capaian Keluaran	100.00
4	Efisiensi	9.21
	Nilai EKA	91.81

PERHITUNGAN IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATKER KPPN PAINAN  
TRIWULAN IV TAHUN 2020

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2020

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Bobot	Capaian Triwulan IV
<b>A. NILAI IKPA</b>			<b>100.00%</b>
1	Pengelolaan UP	8%	8.00%
2	Data Kontrak	0%	0.00%
3	Kesalahan SPM	5%	5.00%
4	Retur SP2D	5%	5.00%
5	Hal III DIPA		
6	Revisi DIPA		
7	Penyelesaian Tagihan	0%	0.00%
8	Konfirmasi Capaian Output	10%	10.00%
9	Rekon LPJ	5%	5.00%
10	Renkas	0%	0.00%
11	Realisasi	15%	15.00%
12	Pagu Minus	5%	5.00%
13	Dispensasi SPM	5%	5.00%
TOTAL Nilai IKPA		58%	58.00%
<b>B. NILAI SMART</b>			<b>91.81%</b>
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q4 (TOTAL CAPAIAN/TOTAL BOBOT)			<b>95,09</b>



**B. Identifikasi Isu Utama, Akar Masalah, Rencana Tindakan dan Aksi**

**1. Isu Utama**

Pada masa Pandemi Covid-19, efisiensi belanja barang persediaan konsumsi dan belanja bahan sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan layanan online e-spm dimana KPPN harus mencetak SPM beserta lampiran bukti dukung sehingga belanja supplies komputer dan kertas tetap tinggi.

**2. Akar Masalah**

Sistem tata kerja baru pada masa pandemi covid-19 menjadikan belanja barang persediaan konsumsi maupun bahan percetakan agak sulit dilakukan efisiensi karena meningkatnya kebutuhan pencetakan pada proses penyelesaian SPM menjadi SP2D. Sementara pada belanja perjalanan dinas tidak banyak realisasi karena digantikan melalui video conference maupun media online lainnya.

**3. Rencana Tindakan**

Tindakan yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga penggunaan akun perjalanan dinas menjadi efisien dan memanfaatkan belanja barang persediaan berupa supplies komputer untuk mendukungnya

**4. Aksi**

Aksi yang akan dilakukan adalah melaksanakan sistem tata kerja baru dalam situasi pandemi covid-19 dengan melakukan efisiensi belanja Birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi.

C. Kinerja Lainnya

Selain Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran sebagaimana diuraikan pada huruf A dan B diatas, Capaian Kinerja Lainnya yang dicapai oleh KPPN Painan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Gaung Pasisie

Informasi realisasi APBN kepada Satker maupun realisasi Penyaluran Dana Alokasi Kegiatan Fisik (DAK Fisik) dan Dana



Desa untuk Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang selama ini dilakukan melalui website KPPN Painan dirasakan kurang maksimal karena tidak semua stakeholder membuka website dimaksud.



KPPN Painan membuat inovasi **Gaung Pasisie**, yaitu program siaran langsung di Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Pesisir Selatan dengan media **Radio langkisau 93.6 FM**. Dengan adanya



informasi yang disampaikan melalui radio diharapkan semua warga nagari di Kabupaten Pesisir Selatan bisa mendengarkan sehingga informasi penyaluran dana APBN melalui KPPN Painan lebih

tersampaikan. Masyarakat akan lebih mengenal peran KPPN Painan dalam penyaluran APBN di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk penyaluran Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai

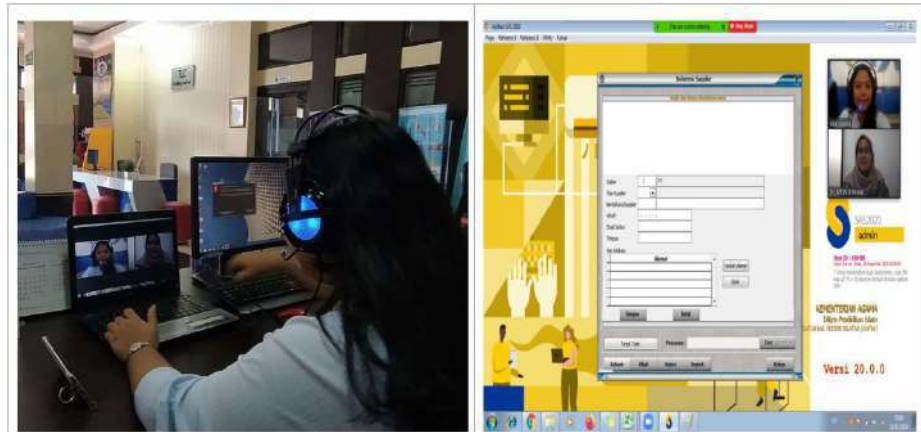
(BLT) sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi penyaluran dana Bantuan tersebut.

Selanjutnya dengan **Gaung Pasisie** ini diharapkan Visi dan Misi dan Tugas Pokok Fungsi KPPN Painan selaku Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan akan lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Inovasi Langkok (Layanan Konsultasi *Online* KPPN Painan)



KPPN adalah kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang sebelum masa pandemi Covid-19 melakukan layanan Perbendaharaan secara tatap muka. Wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal maret 2020 memberi dampak langsung dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Pembatasan terhadap aktivitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus berpengaruh pada aktivitas sehari-hari, baik bagi pelaku bisnis maupun perkantoran dalam menerapkan sistem layanan. Penerapan protokol kesehatan menjadi bagian dari standar yang wajib dipatuhi pada saat pemberian layanan baik secara internal maupun eksternal. Pandemi virus corona telah mengubah segalanya, termasuk dalam hal konsultasi perbendaharaan. Kini telah tersedia beragam layanan konsultasi online dari KPPN. Lewat konsultasi online atau telekonsultasi, resiko penularan Covid-19 bisa dikurangi karena tidak ada kontak fisik. Dengan Langkok, layanan tidak hanya dilakukan pada jam kerja saja, namun KPPN Painan tetap melayani konsultasi di luar jam kerja.



c. Si Malin (**SYSTEM INFORMATION AND REMINDER DEADLINE**)

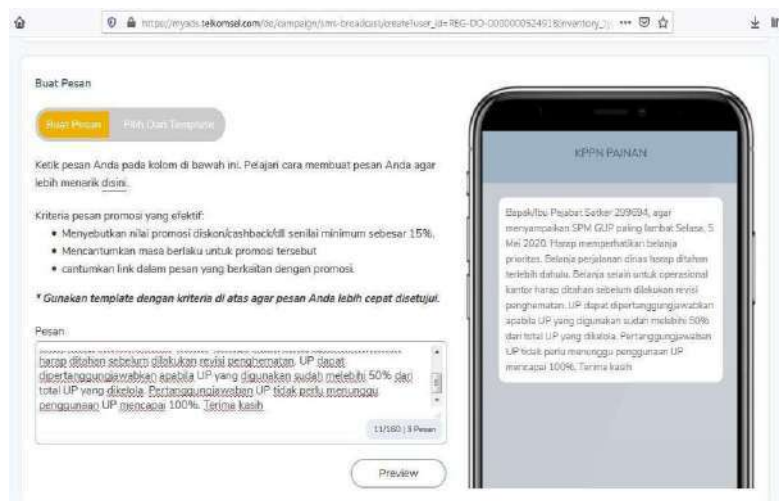
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, tujuan IKPA antara lain : Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D) serta Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja).

KPPN Painan sebagai Kuasa BUN di Daerah tidak hanya melaksanakan fungsi penyaluran APBN yang telah dialokasikan kepada DIPA Satker di wilayah kerjanya. Namun juga dituntut untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satker di wilayah kerjanya tersebut. Oleh karena itu, KPPN Painan telah melakukan berbagai langkah yang dinilai strategis dalam rangka optimalisasi upaya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran tingkat KPPN.

Dalam rangka meningkatkan nilai IKPA KPPN Painan, perlu sarana untuk mengingatkan satker mengenai batas waktu yang menjadi tolak ukur 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Berbagai peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran oleh KPPN Painan salah satunya dengan menciptakan inovasi “Aplikasi SI MALIN - System Information and Remainder Deadline”. Aplikasi dalam bentuk sms gateway sebagai pengirim atau menerima sms, baik untuk kepentingan broadcast, service informasi kepada satker dan update informasi/peraturan. Aplikasi SIMALIN dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan satker melalui layanan sms.

**IMPLEMENTASI “SIMALIN – “SYSTEM INFORMATION AND REMAINDER DEADLINE”**

- 1) Menggunakan sms gateway yaitu suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk EUA (User External Application) menghantar dan menerima SMS dari peralatan mobile (HP, PDA phone, dll) yang langsung ditunjukkan ke nomor handphone KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran. SMS Gateway membolehkan UEA untuk berkomunikasi dengan Telco SMSC (telkomsel, indosat, dll). UEA melakukan komunikasi dengan SMS Gateway melalui Internet menggunakan standard HTTP GET atau HTTPS (untuk komunikasi yang aman).
- 2) SMS (short message service) di setting untuk terkirim 2 (dua) hari sebelum batas waktu pengajuan deadline berakhir.
- 3) Selain informasi sebagai reminder deadline, aplikasi SIMALIN juga digunakan untuk menyampaikan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan satker seperti informasi, pengumuman, pengingat dan lain-lain.



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi  
a. Nilai-nilai Integritas



Integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh insan Kementerian Keuangan, sebagaimana tersebut dalam Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Gugus Kendali Mutu yang dilaksanakan KPPN Painan pada tanggal 14 November 2020 bertujuan untuk penyampaian materi Nilai Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Keuangan. GKM dilaksanakan outdoor bertempat di pantai Ransam Painan dengan simulasi dan permainan untuk mengenal lebih jauh mengenai beberapa hal terkait Nilai Integritas, diantaranya :

- 1) 7 klasifikasi tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001, yaitu : (1) Merugikan keuangan Negara; (2) Suap; (3) Gratifikasi; (4) Penggelapan Dalam Jabatan; (5) Pemasaran; (6) Perbuatan Curang; (7) Konflik kepentingan;
- 2) Perbedaan antara suap, pemasaran dan gratifikasi;
- 3) Jenis gratifikasi yang harus dilaporkan dan tidak perlu dilaporkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017;
- 4) Struktur UPG KPPN Painan; dan
- 5) Mekanisme pelaporan gratifikasi.

Pada akhirnya narasumber mengingatkan kepada semua peserta agar selalu menjaga sikap dan tindakan dari kegiatan yang mengarah kepada korupsi dengan cara menjaga dan mengimplementasikan 9 nilai-nilai anti korupsi/Nilai-nilai Integritas yaitu: jujur, tanggungjawab, disiplin, berani, adil, peduli, mandiri, kerja keras, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

b. Aplikasi Gratifikasi Online (GOL), LP2P, dan LHKPN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai khususnya dalam inisiatif pemberantasan korupsi, KPPN Painan menyelenggarakan Gugus Kendali Mutu dengan tema Petunjuk Pengisian Aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL), LP2P, dan LHKPN. Sebelumnya dijelaskan pengertian dan tindakan apa saja yang masuk dalam ranah korupsi.

- 1) Pengertian dan Jenis Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Tujuh jenis korupsi yaitu merugikan keuangan Negara, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.**
- 2) Perbedaan antara gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan beserta contohnya.
- 3) Karakteristik gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan beserta contohnya.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan:

- a) Gratifikasi terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat.



- b) Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.
  - c) Pemberian sesame pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300.000,00 per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.
- Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan:
- a) Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
  - b) Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri.
  - c) Seminar kit yang berlaku umum dan bernilai wajar.
  - d) Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum.
  - e) Manfaat bagi seluruh pesertakoperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum.
- 4) Mekanisme pelaporan gratifikasi melalui UPG dan aplikasi Gratifikasi *Online* (GOL).
  - 5) Petunjuk pengisian aplikasi LP2P dan LHKPN yang untuk menghindari adanya kesalahan dan potensi temuan saat dilakukan profiling integritas.





3. Penghargaan-penghargaan

- a. Peringkat II Garda Pengelolaan Kas Tahun 2019 Kategori KPPN Tipe A2



Prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan yaitu dengan peringkat No 2 tertinggi dalam penilaian Indikator Kinerja Pengelolaan Kas Kuasa BUN Daerah periode tahun 2019 untuk kategori KPPN Tipe A2 di Indonesia.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan evaluasi kinerja pengelolaan kas periode Tahun 2019 seluruh Indonesia yang terdiri dari 9 Indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja Pengelolaan Kas Kuas BUN di Daerah. Indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja Pengelolaan Kas Kuas BUN di Daerah adalah :

- 1) Dimensi Perencanaan Kas yang terdiri dari :
  - a) Tingkat Akurasi Rencana Kas Harian KPPN
  - b) Kepatuhan Pengiriman RPD Harian
  - c) Jumlah Pemberian Dispensasi RPD Harian
- 2) Dimensi Pengeluaran Kas yang terdiri dari :
  - a) Tingkat Akurasi Penyelesaian SP2D 1 jam
  - b) Tingkat Kecepatan Penyelesaian Retur
- 3) Dimensi Penerimaan Kas
  - a) Kepatuhan Pelaksanaan Monev Bank/Pos Persepsi
- 4) Dimensi Akuntabilitas Pengelolaan Kas
  - a) Ketepatan Waktu Penyampaian LPJ Bendahara

- b) Akurasi Data Transaksi Pengeluaran Negara
- c) Akurasi Data Utang Pihak Ketiga

Kepala KPPN Painan, Lita Qadarina Hardian, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat dan pegawai KPPN Painan atas prestasi yang diraih ini yang merupakan kerja keras teman teman semua, dan ini juga merupakan bukti sinergi dan profesionalisme dalam bekerja. Mudah-mudahan ke depan, semangat bekerja dan kekompakan ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan agar bisa mempertahankan prestasi yang diraih ini.

b. Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Predikat WBK tersebut telah disandang oleh KPPN Painan pada tahun 2020. Penyerahan piagam penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diserahkan oleh Menteri Pendahayagunaan Aratur Negaran dan Reformasi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 melalui Zoom Meeting.

c. Peringkat VI Pengelolaan Kinerja Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-303/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020, KPPN Painan memperoleh peringkat 6 Pengelolaan Kinerja Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2.

d. Prestasi lainnya di ruang lingkup Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat:

- Peringkat I Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah KPPN Tipe A2 Tahun 2018 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat;
- Peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Tahun 2019 Kategori KPPN Tipe A2 Lingkup Povinsi Sumatera Barat;
- Peringkat I KPPN Tipe A2 di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Dengan Penilaian Kinerja Terbaik Berdasarkan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Periode Semester II Tahun 2019;
- Pengelola Akun *Facebook* Resmi Terbaik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Semester I Tahun 2020; dan
- Peringkat I Pengelola *Website (Microweb)* Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Semester I Tahun 2020.

# BAB IV

## PENUTUP

**BAB IV  
PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dalam tahun anggaran 2020 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Painan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara. Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan KPPN Painan memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2020 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi adalah Nilai Kinerja Organisasi KPPN Painan yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 109.39 dari total 18 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode mendatang.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**PERJANJIAN KINERJA (KONTRAK**  
**KINERJA)**  
**TAHUN 2020**



## KONTRAK KINERJA NOMOR:142/PB.12/2020

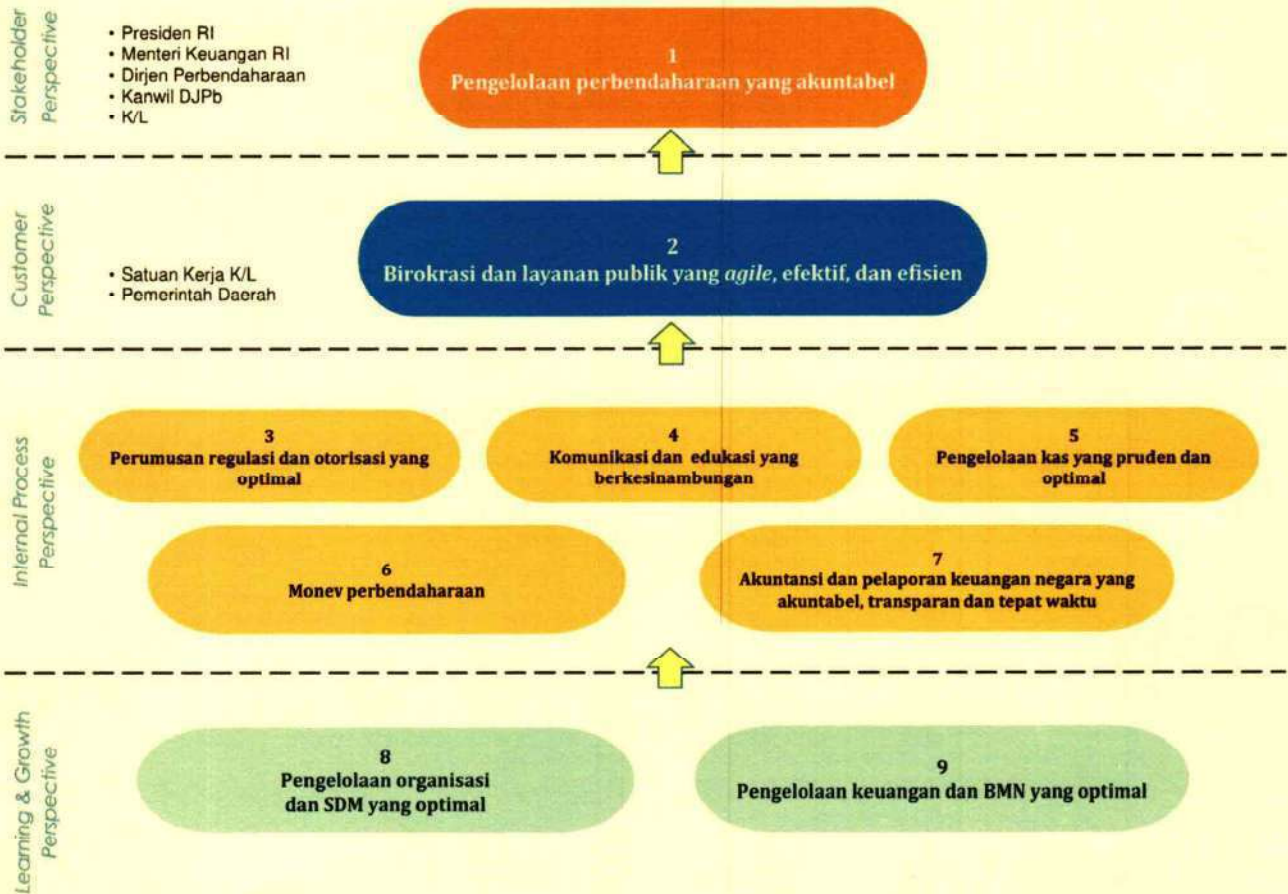
### KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020

#### Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Peta Strategi



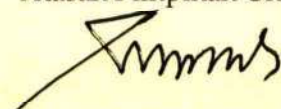


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA**  
**PAINAN**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
		1c-CP Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,55 (skala 5)
		2b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan	4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87
5.	Pengelolaan kas yang prudent dan optimal	5a-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
6.	Monev perbendaharaan	6a-CP Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80
		6b-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	7a-N Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.1%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal	8a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80
		8c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
		8d-N Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74
9.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	9a-N Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81
		9c-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%

**Program/Kegiatan**

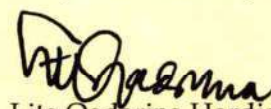
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara  
 Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Ade Rohman  
 NIP 196207111982101001

**Anggaran**

Rp. 1.761.752.000,-  
 Painan, 31 Januari 2020  
 Pimpinan Unit Kerja,



Lita Qadarina Hardian  
 NIP 197509251995112001

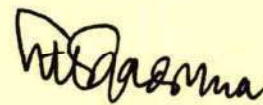
**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2020**

Kode SS/IKU	IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
<b>I</b>	<b>Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel</b>								
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88	
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94	
1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
<b>II</b>	<b>Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien</b>								
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4.55	4.55	-	4.55	-	4.55	
2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	
<b>III</b>	<b>Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal</b>								
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	
<b>IV</b>	<b>Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan</b>								
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	87	-	87	87	87	
<b>V</b>	<b>Pengelolaan kas yang prudent dan optimal</b>								
5a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
<b>VI</b>	<b>Monev perbendaharaan</b>								
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	80	80	80	80	80	80	80	
6b-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	20%	50%	50%	60%	60%	100%	100%	
<b>VII</b>	<b>Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu</b>								
7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	
<b>VIII</b>	<b>Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal</b>								
8a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77	

Kode SS/ IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	80	80
8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	-	-	-	-	-	74	74
<b>IX</b>	<b>Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal</b>							
9a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	81	81
9c-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Painan, 31 Januari 2020

PNS yang dinilai,



Lita Qadarina Hardian  
NIP 197509251995112001

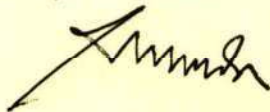
## Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Ade Rohman	1	Nama	Lita Qadarina Hardian
2	NIP	196207111982101001	2	NIP	197509251995112001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Gol. IV/a
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	88	100	12 bln	-
2	Mewujudkan Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	12 bln	-
3	Mewujudkan akurasi perencanaan kas KPPN	-	80%	100	12 bln	-
4	Mewujudkan kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,55 (skala 5)	100	12 bln	-
5	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3 (skala 4)	100	12 bln	-
6	Mewujudkan penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	12 bln	-
7	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87	100	12 bln	-
8	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	12 bln	-
9	Memenuhi nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	-	80	100	12 bln	-
10	Mewujudkan pelaksanaan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	12 bln	-
11	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	12 bln	-
12	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	77	100	12 bln	-
13	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	80	100	12 bln	-
14	Memenuhi nilai pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i> yang berkualitas	-	83	100	12 bln	-
15	Mewujudkan nilai rata-rata pelaksanaan literasi perbendaharaan yang baik	-	74	100	12 bln	-

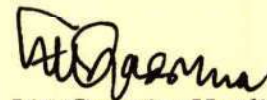
No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
16	Mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal	-	92%	100	12 bln	-
17	Mewujudkan nilai LK tingkat UAKPA dan UAKPB yang berkualitas	-	81	100	12 bln	-
18	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95%	100	12 bln	-

Pejabat Penilai,



Ade Rohman  
NIP 196207111982101001

Painan, 31 Januari 2020  
PNS yang dinilai,



Lita Qadarina Hardian  
NIP 197509251995112001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2020**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
1.	SS: Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan  IKU: Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Optimalisasi transaksi pembayaran non tunai di tingkat KPPN	Meningkatnya pemahaman, kesadaran, dan transaksi pembayaran non tunai tingkat KPPN  <b>Target:</b> Minimal 70% satker wajib KPP di tingkat KPPN memiliki besaran proporsi UP Tunai ≤ 60%	Q1: Edukasi penggunaan, keamanan, dan pertanggung-jawaban transaksi non tunai kepada Satker  Q2: Monev implementasi Transaksi Pembayaran Non Tunai (KKP) di tingkat KPPN  Q3: Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> (Perbankan dan KPP)  Q4: Analisis perkembangan transaksi non Tunai dalam pelaksanaan APBN di tingkat wilayah	Q1: Laporan kegiatan  Q2: Laporan kegiatan  Q3: Laporan kegiatan  Q4: Kajian/ Analisis	Januari s.d Desember 2020	Kepala KPPN	-
2.	SS: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal  IKU: Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	Pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	Peningkatan kapasitas pegawai	Q1: <i>Coaching and counseling</i> Q2: <i>Coaching and counseling</i> Q3: <i>Coaching and counseling</i> Q4: <i>Coaching and counseling</i>	Q1: 65% Q2: 65% Q3: 65% Q4: 65%	Januari s.d. Desember 2020	Kepala KPPN	-

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	SS: Monev Perbendaharaan IKU: Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa	Pelaksanaan FGD DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dalam rangka kelancaran penyaluran dana desa	FGD dengan Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	Laporan Kegiatan	Semester 1	Kepala KPPN	-

Painan, 31 Januari 2020  
PNS yang dinilai,



Lita Qadarina Hardian  
NIP 197509251995112001

**LAMPIRAN 2**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**(RKT)**  
**TAHUN 2020**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN

JALAN ILYAS YACUB NO. 3 PAINAN  
TELEPON (0756)21521, 21613 FAKSIMILE (0756) 21716 Situs: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/painan

**NOTA DINAS**

ND-057/WPB.03/KP.06/2020

Yth. : Seluruh Pejabat/Pegawai KPPN Painan  
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan  
Hal : Rapat Pembahasan RKT (*event calender*) dan Perumusan Visi dan Misi, Peta Strategi, IKU, dan Rencana Strategis Organisasi Serta Penyusunan Inisiatif Strategi Tahun 2020  
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Matriks Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Tahun 2019 khususnya pada prinsip SFO "Menggerakkan Perubahan Melalui Kepemimpinan", dengan ini disampaikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai KPPN Painan untuk hadir pada kegiatan Gugus Kendali Mutu pada:

Hari / tanggal : Rabu, 29 Januari 2020  
Waktu : 16.00 s.d 17.00  
Tempat : Ruang Aula KPPN Painan  
Kegiatan : 1. Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan *Event Calender*  
2. Perumusan Visi dan Misi Peta Strategi, IKU, dan Rencana Strategis Organisasi  
3. Penyusunan Inisiatif Strategi Tahun 2020  
Narasumber : Lita Qadarina Hardian  
Notulis : Elsa Natalia Situmorang

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lita Qadarina Hardian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN

JALAN ILYAS YACUB NO. 3 PAINAN  
TELEPON (0756)21521, 21613 FAKSIMILE (0756) 21716 Situs: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/painan

DAFTAR HADIR

Rapat Pembahasan RKT (*event calender*) dan Perumusan Visi dan Misi, Peta Strategi, IKU, dan Rencana Strategis Organisasi Serta Penyusunan Inisiatif Strategi Tahun 2020

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Januari 2020  
Waktu : 16.00 WIB s.d. 17.00  
Tempat : Ruang Aula KPPN Painan  
Acara :  
- Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan *Event Calender*  
- Perumusan Visi dan Misi, Peta Strategi, IKU, dan Rencana Strategis Organisasi  
- Penyusunan Inisiatif Strategis Tahun 2020

No.	Nama	Seksi / Subbagian	Tanda tangan
1.	Lita Q	KR	1.
2.	Sukarman	PDMS	2.
3.	Qoulan Saclida	Veraki	3.
4.	Zhanifah Aizal	Bank	4.
5.	Aisyah Mufidah	PDMS	5.
6.	Murmanwati	um	6.
7.	Daril	um	7.
8.	Jafmiwita	Bank	8.
9.	Esti Kusni	Verasi	9.
10.	Elsa Natakis	Umum	10.
11.	Mekar Pramudi A.	PDMS	11.
12.	Sudino	Umum	12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Kepala Kantor

Lita Qadarina Hardian

**EVENT CALENDER (KALENDER KEGIATAN)**  
**KPPN PAINAN**  
**PERIODE TAHUN 2020**

NO.	BULAN	TANGGAL KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	DESKRIPSI EVENT DAN PESERTA	PERKIRAAN DANA	PIC
1	Januari 2020	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan IV Tahun 2019 serta Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019. Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya serta Membahas Unit Pengendali Risiko KPPN Painan	130,000	Subbag Umum dan Seksi Veraki
2		Minggu 1	Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2020 dan Komitmen Anti Gratifikasi	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Gratifikasi Tahun 2020 oleh Seluruh Pegawai		Seksi Vera KI
3		Minggu 2	Rapat Monev Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
4		Minggu 5	FGD Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 2019	Aula KPPN Painan	FGD Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 2019 dihadiri seluruh satuan kerja		Seksi PDMS dan Seksi Veraki
5		Minggu 4	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Internalisasi Rencana Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2020 dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI
6		Minggu 5	Penandatanganan Kontrak Kinerja	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019 dan memorandum anti gratifikasi oleh Seluruh Pegawai		Subbag Umum
7	Februari 2020	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Januari) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Januari Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130,000	Subbag Umum
8		Minggu 1	Rapat Monev Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
9		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Seleksi Impassing Jabfung dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum
10		Minggu 1	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Implementasi Nadine dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum
11		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor

12	Maret 2020	Minggu 1	Service Excellent dan motivation training	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	3,475,000	Seksi PDMS
13		Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Februari Tahun 2020)	Aula KPPN Painan	Dikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Februari Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130,000	Subbag Umum
14		Minggu 1	Rapat Money Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Money Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
15		Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM DKI dihadiri oleh seluruh pegawai		subbag Umum
16		Minggu 3	Money Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan money bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	600,000	Seksi Bank
17		Minggu 3	FGD DAK Fisik	Aula KPPN Painan	FGD Dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan akan dilakukan pada tanggal 19 Maret 2020	2,100,000	Seksi Bank
18		Minggu 3	Pembinaan ke satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	1,600,000	Seksi PDMS dan Seksi Veraki
19		Minggu 4	Bintek Refreshment SAKTI	Aula KPPN Painan	Bintek Refreshment SAKTI yaitu Pengenalan Modul Pelaksana dan Pelaporan SAKTI akan dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Maret 2020	2,100,000	Seksi PDMS
20		Minggu 4	Capacity Building	Pesisir Selatan	Kegiatan Capacity building diikuti oleh seluruh pegawai, PPNPN dan Keluarga	18,000,000	subbag Umum
21		Minggu 4	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Manajemen Risiko dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI
22		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Dana Desa akan dilakukan pada tanggal 23 Januari 2020		Kepala Kantor
23	Apr-20	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Maret ) Tahun 2020 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Dikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Maret Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum dan Seksi Veraki

24	Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
25	Minggu 1	Survey IKM	Satuan kerja	Survey Indeks Kepuasan Masyarakatan Semester 1 Tahun 2020. Survey ini dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan		Seksi PDMS
26	Minggu 2	Pendampingan SAKTI	Aula KPPN Painan	Pendampingan penyusunan RKAKL dan Pengenalan Modul Pelaksanaan dan Pelaporan di hadiri oleh Satker	4,725,000	Seksi PDMS
27	Minggu 3	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Kinerja dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum
28	Minggu 4	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Penguatan Integritas dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Bank
29	Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang Kinerja Pelaksanaan Anggaran		Kepala Kantor
30	Mei 2020	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan April ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Dikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan April Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130,000	Subbag Umum
31	Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
32	Minggu 3	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM SOP dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi PDMS
33	Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM PMK 183 Tahun 2019 dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Bank
34	Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang WBK		Kepala Kantor
35	Juni 2020	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan Juni ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Dikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juni Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya	130,000	Subbag Umum

36	Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
37	Minggu 1	Seminar PUG	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai	1,325,000	Duta PUG
38	Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum
39	Minggu 3	Money Kredit Program UMI	Debitur dan LKBP	Melakukan monev terhadap Kredit Program UMI ke Debitur dan LKBP	600,000	Seksi Bank
40	Minggu 3	Survey kepuasan pengguna layanan internal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pegawai KPPN Painan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pegawai terhadap layanan internal KPPN dengan indeks tertentu yang ditetapkan	-	Subbag Umum
41	Minggu 3	Money Dana Transfer	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran Dana Transfer	600,000	Seksi Bank
42	Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Pengaduan dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI
43	Minggu 3	Pembinaan ke satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	1,600,000	Seksi PDMS dan Seksi Veraki
44	Minggu 4	Money Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	600,000	Seksi Bank
45	Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisa FM	di Radio Langkisa	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor
46	Juli	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan Juni ) Tahun 2020 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Dilikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juni Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyekti capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum dan Seksi Veraki
47	Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
48	Minggu 3	Bimtek Pendampingan penyusunan LK Tk UAKPA semester I Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Bimtek Pendampingan penyusunan LK Tk UAKPA semester I Tahun 2020 Dilikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Painan	6,000,000	Seksi Vera KI

49		Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum	
50		Minggu 3	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi PDMS	
51		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang DAK Fisik		Kepala Kantor	
52	Agustus 2020	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan Juli ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juli Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum	
53		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI	
54		Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum	
55		Minggu 3	Pelatihan Damkar dan evakuasi bencana	outdoor	Pelatihan Damkar dan evakuasi bencana yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Painan dengan mengundang Pemadam Kebakaran	1,500,000	Subbag Umum	
56		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Kode Etik Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI	
57		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Tusi KPPN		Kepala Kantor	
58	Sep-20	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan Agustus ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum	
59		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI	
60		Minggu 2	Monev Layanan Bank/Pos Persepsi Triwulan III 2018	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	600,000	Seksi Bank	

61		Minggu 2	Sosialisasi/FGD Implementasi SAKTI dan Peringatan HAKORDIA	Satuan Kerja	Sosialisasi/FGD Implementasi SAKTI dihadiri seluruh Satker	4,725,000	Seksi PDMS
62		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM PUG dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi PDMS
63		Minggu 3	Money Realisasi Belanja	Satuan Kerja	Melakukan monev pelaksanaan anggaran ke beberapa satuan kerja	1,200,000	Seksi PDMS
64		Minggu 3	Edukasi Anti Korupsi	MAN 2 Pessel	Edukasi Anti Korupsi untuk Siswa	1,000,000	Seksi Vera KI
65		Minggu 3	Pembinaan ke satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	1,600,000	Seksi PDMS dan Seksi Veraki
66		Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM Mekanisme Retur Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Bank
67		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor
68	Oktober 2020	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan September ) Tahun 2020 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan September Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum dan Seksi Veraki
69		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
70		Minggu 3	Pelatihan Service Excellent Semester 2	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNNP dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan layanan kepada stakeholders		Subbag Umum
71		Minggu 1	Survey IKM Semester 2	Satuan Kerja	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2020. Survey ini dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan		Seksi PDMS
72		Minggu 1	Sosialisasi LLAT 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh satuan kerja dan bank/ pos persepsi mitra kerja KPPN Painan sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2020	4,725,000	Seksi PDMS, Seksi Bank, dan Seksi Veraki
73		Minggu 4	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Subbag Umum
74		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Benturan Kepentingan dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI



75	Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang Realisasi APBN s.d. TW3		Kepala Kantor
76	Minggu 4	Peringatan Hari ORI	KPPN Painan	Merayakan Hari Oeang Republik Indonesia dengan mengundang Instansi Kantor Vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Painan	2,500,000	Subbag Umum
77	Nov-20 Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 4 (Bulan Oktober ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum
78	Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
79	Minggu 2	Monev Dana Transfer	Pemda	Melakukan monev ke Pemda terkait penyaluran Dana Transfer	600,000	Seksi Bank
80	Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi PDMS
81	Minggu 3	Pembinaan Satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	1,600,000	Seksi PDMS dan Seksi Veraki
82	Minggu 3	Monev UMI	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan Monev Kredit Program ke Bank Mitra Kerja KPPN Painan,	600,000	Seksi Bank
83	Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Bank
84	Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang LLAT		Kepala Kantor

85	Desember 2020	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 4 (Bulan November ) Tahun 2020	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan November Tahun 2020 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko	130,000	Subbag Umum
86		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai	130,000	Seksi Vera KI
87		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkissau FM	di Radio Langkissau	Talkshow tentang Kebijakan Pelaksanaan Anggaran 2021		Kepala Kantor
88		Minggu 4	Monitoring Layanan Penerimaan Negara Akhir Tahun 2018	Aula KPPN Painan	Melakukan monev penerimaan Negara pada akhir tahun 2020 ke bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Painan	600,000	Seksi Bank

Kepala Subbagian Umum

  
Sidiro

Kepala seksi PDMS

  
Mekar Pramudi Arthawurie

Kepala seksi Bank

  
Jasmiwita

Kepala seksi Yeraki

  
Sri Gustini Ekawaty

Kepala Kantor

  
Lita Qadarina Hardian



**LAMPIRAN 3**  
**FORMULIR PENGUKURAN**  
**KINERJA**  
**TAHUN 2020**

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan

Tahun Anggaran :2020

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
<b>1 Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel</b>					112.66%
1	1a-CP	Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	98.93	112.42%
2	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99.30	105.64%
3	1c-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	80%	99.42%	120.00%
<b>2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</b>					113.54%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.55	4.97	109.23%
5	2b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3	4	120.00%
<b>3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal</b>					100.51%
6	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40%	99.91%	100.51%
<b>4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan</b>					106.54%
7	4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87	92.69	106.54%
<b>5 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal</b>					102.04%
8	6a-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%	102.04%
<b>6 Monev perbendaharaan</b>					110.00%
9	6a-CP	Nilai Kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	80	99.64	120.00%
10	6b-CP	Presentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100.00%
<b>7 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu</b>					101.94%
11	7a-N	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10%	100%	101.94%
<b>8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Optimal</b>					111.71%
12	8a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	84.7	110.00%
13	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	80	95.8	119.75%
14	8c-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>strategy focused organization</i>	83	92.69	111.67%
15	8d-N	Nilai rata-rata pelaksanaan Literasi Perbendaharaan	74	78	105.41%
<b>9 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal</b>					107.05%
16	9a-N	Persentase Pengelolaan BMN yang optimal	92.00%	97.62%	106.11%
17	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	81	91	112.35%
18	9b-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.00%	97.55%	102.68%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : 1.506.072.000

Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2020 : 1.442.846.093

Kepala KPPN Painan

*Lita Qadarina Hardian*

Lita Qadarina Hardian  
NIP. 197509251995112001



# LAMPIRAN 4 LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara			1,506,072,000	
1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara			1,506,072,000	
1705.002	Layanan Perbendaharaan Kuasa BUN di Daerah	43.0 Stakeholder		37,933,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
1705.002.001	Tanpa Sub Output			37,933,000	
051	Konsultasi	5.0 Kegiatan		18,373,000	U
A	Tanpa Sub Komponen			18,373,000	
521211	Belanja Bahan			2,365,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Konsumsi Peserta Pemda [2 Keg x 1 Pemda x 3 Org]	6.0 OK	55,000	330,000	
	- Konsumsi Peserta LKBB [2 Keg x 2 LKBB x 1 Org]	4.0 OK	55,000	220,000	
	- Konsumsi Peserta BankPos [1 Keg x 4 Bank x 2 Org]	8.0 OK	55,000	440,000	
	- Konsumsi KPPN [5 Keg x 5 Org]	25.0 OK	55,000	1,375,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			10,008,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Transport [2 Org x 3 Kali]	6.0 OK	410,000	2,460,000	
	- Akomodasi [2 Org x 3 Kali x 1 Hr]	6.0 OH	650,000	3,900,000	
	- Uang Harian [2 Org x 3 Kali x 2 Hr]	12.0 OH	304,000	3,648,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6,000,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Transport Lokal [2 Org x 10 Kali x 2 Hr]	40.0 OK	150,000	6,000,000	
052	Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana	36.0 SATKER		1,000,000	U
A	Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana			1,000,000	
521211	Belanja Bahan			1,000,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 Tahun	1,000,000	1,000,000	
053	Survey Kepuasan Pengguna Layanan	2.0 Kegiatan		2,000,000	
A	Tana Sub Komponen			2,000,000	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Belanja Bahan	2.0 Keg	1,000,000	2,000,000	
054	Pelaksanaan Pembinaan Satker	4.0 Kegiatan		14,160,000	U
A	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis			9,360,000	
521211	Belanja Bahan			9,360,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Konsumsi Peserta Satker [2 Keg x 33 Satke x 2 Org]	132.0 Ok	55,000	7,260,000	
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [2 Keg x 10 Org]	20.0 OK	55,000	1,100,000	
	- ATK dan Bahan Habis Pakai [2 Keg]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
B	Pembinaan Satker			4,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,800,000	RM
	(KPPN.142-Painan )				
	- Transport Lokal [2 Org x 8 Kali x 2 Hr]	32.0 OHF	150,000	4,800,000	
055	Monev Pelaksanaan Anggaran dan PNPB	1.0 PEMDA		600,000	U

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Tanpa Sub Komponen			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan )			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 Org x 2 Kali]	4.0 OHF	150,000	600,000	
<b>056</b>	<b>Monev Dana Transfer</b>	<b>1.0 PEMDA</b>		<b>600,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan )			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 Org x 2 Kali]	4.0 OHF	150,000	600,000	
<b>057</b>	<b>Monev Ultra Mikro/Kredit Program</b>	<b>2.0 LKBB</b>		<b>600,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan )			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 Org x 2 Kali x 1 Hr]	4.0 OK	150,000	600,000	
<b>058</b>	<b>Monev Bank/Pos</b>	<b>4.0 BANKPOS</b>		<b>600,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan )			600,000	RM
	- Transport Lokal [2 Org x 2 Kali x 1 Hr]	4.0 OK	150,000	600,000	
<b>1705.003</b>	<b>Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah</b>	<b>8.0 Laporan</b>		<b>6,926,000</b>	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
<b>1705.003.001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>			<b>6,926,000</b>	
<b>051</b>	<b>Konsultasi</b>	<b>4.0 Frekuensi</b>		<b>3,336,000</b>	
A	Tanpa Sub Komponen			3,336,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.142-Painan )			3,336,000	RM
	- Transport [2 Org x 1 Kali]	2.0 OK	410,000	820,000	
	- Akomodasi [2 Org x 1 Kali x 1 Hr]	2.0 OH	650,000	1,300,000	
	- Uang Harian [2 Org x 1 Kali x 2 Hr]	4.0 OH	304,000	1,216,000	
<b>052</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah</b>	<b>8.0 Laporan</b>		<b>1,000,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			1,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan )			1,000,000	RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 Tahun	1,000,000	1,000,000	
<b>053</b>	<b>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</b>	<b>2.0 Kegiatan</b>		<b>2,590,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			2,590,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan )			2,590,000	RM
	- Konsumsi Peserta Satker [1 Keg x 33 Satke x 1 Org]	33.0 OK	55,000	1,815,000	
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [1 Keg x 5 Org]	5.0 OK	55,000	275,000	
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1.0 Keg	500,000	500,000	
<b>1705.951</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>352,408,000</b>	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1705.951.001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>			<b>352,408,000</b>	
<b>995</b>	<b>Pengadaan Kendaraan Bermotor</b>	<b>1.0 unit</b>		<b>246,000,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Subkomponen			246,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.142-Painan )			246,000,000	RM
	- Pengadaan Kendaraan operasional Roda 4 1 unit	1.0 unit	246,000,000	246,000,000	
<b>997</b>	<b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>8.0 unit</b>		<b>64,000,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Subkomponen			64,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.142-Painan )			64,000,000	RM
	- Lemari Arsip	5.0 unit	2,700,000	13,500,000	
	- Meja Mini TLC	1.0 Unit	8,500,000	8,500,000	
	- Kursi ruang tunggu	2.0 unit	5,000,000	10,000,000	
	> Peralatan rumah jabatan			32,000,000	
	- Pengadaan inventaris Rumah Jabatan	1.0 PKT	32,000,000	32,000,000	
<b>998</b>	<b>Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	<b>70.0 M2</b>		<b>42,408,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Subkomponen			42,408,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.142-Painan )			42,408,000	RM
	- Penggantian keramik, kusen dan toilet Rumah Dinas	70.0 M2	605,830	42,408,000	
<b>1705.970</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>1.0 Layanan</b>		<b>41,576,000</b>	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
<b>1705.970.001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>			<b>41,576,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pengelolaan Keuangan</b>	<b>1.0 Tahun</b>		<b>7,445,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			7,445,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.142-Painan )			7,445,000	RM
	- Penyelesaian LHPLAKIPRKAKLSAI	1.0 Tahun	7,445,000	7,445,000	
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>2.0 Kegiatan</b>		<b>2,000,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Komponen			2,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan )			2,000,000	RM
	- DokumentasiPencetakanPenggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal	1.0 Keg	1,000,000	1,000,000	
	- DokumentasiPencetakanPenggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	1.0 Tahun	1,000,000	1,000,000	
<b>053</b>	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	<b>2.0 Kegiatan</b>		<b>24,131,000</b>	<b>U</b>
A	Tanpa Sub Output			24,131,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan )			3,381,000	RM
	> Peningkatan Kualitas SDM			3,381,000	
	- Konsumsi [21 Peg x 1 Kali]	21.0 OK	61,000	1,281,000	
	- Barang Habis Pakai [21 Peg x 2 Kali]	42.0 OK	50,000	2,100,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.142-Painan )			1,000,000	RM



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	> Apresiasi Pegawai - Barang Habis Pakai [1 Org x 2 Kali] <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.142-Painan )	2.0 OK	500,000	1,000,000 1,000,000 3,600,000	RM
524113	> Peningkatan Kualitas SDM - Honor Narasumber [1 Org x 2 Jam x 2 Kali] <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan )	4.0 OJ	900,000	3,600,000 3,600,000 150,000	RM
524114	> Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM - Transport Narasumber [1 Org x 1 Kali] <u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan )	1.0 OK	150,000	150,000 150,000 16,000,000	RM
<b>054</b>	<b>Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Kehumasan</b>	<b>4.0 Kegiatan</b>		<b>16,000,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Tanpa Sub Komponen</i>			<i>8,000,000</i>	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan )			8,000,000	RM
1705.994	<u>Layanan Perkantoran</u> Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	1.0 Layanan		1,067,229,000	
<b>1705.994.001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>			<b>1,067,229,000</b>	
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>12.0 Bulan</b>		<b>182,265,000</b>	
A	<i>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</i>			<i>182,265,000</i>	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.142-Painan )			123,276,000	RM
	- Uang Makan Golongan II [7 Peg x 19 Hari x 12 Bulan]	1596.0 OH	35,000	55,860,000	
	- Uang Makan Golongan IV [1 Peg x 17 Hari x 12 Bulan]	204.0 OH	41,000	8,364,000	
	- Uang Makan Golongan III [7 Peg x 19 Hari x 12 Bulan]	1596.0 OH	37,000	59,052,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.142-Painan )			58,989,000	RM
	- Uang Lembur Golongan II [7 Peg x 2 Jam x 53 Hari]	742.0 OJ	17,000	12,614,000	
	- Uang Lembur Golongan III [7 Peg x 2 Jam x 53 Hari]	742.0 OJ	20,000	14,840,000	
	- Uang Lembur Golongan IV [1 Peg x 2 Jam x 53 Hari]	106.0 OJ	25,000	2,650,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan II [7 Peg x 1 Kali x 53 Hari]	371.0 OH	35,000	12,985,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan III [7 Peg x 1 Kali x 53 Hari]	371.0 OH	37,000	13,727,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan IV [1 Peg x 1 Kali x 53 Hari]	53.0 OH	41,000	2,173,000	
<b>002</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>	<b>12.0 Bulan</b>		<b>884,964,000</b>	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>385,872,000</i>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.142-Painan )			314,872,000	RM
	- Keperluan Seharihari Perkantoran	1.0 Tahun	60,000,000	60,000,000	
	- Kertas BerhargaMaterai	1.0 Tahun	2,000,000	2,000,000	
	> Honorarium PPNPN			252,872,000	
	- Honor Satpam [4 Orang x 13 Bulan]	52.0 OB	2,632,000	136,864,000	
	- Honor pramubhakti [2 orang x 13 BULAN]	26.0 OB	2,392,000	62,192,000	
	- Honor Sopir [1 Orang x 13 Bulan]	13.0 OB	2,632,000	34,216,000	
	- Uang Lembur Satpam [4 Orang x 2 Jam x 50 Hari]	400.0 OJ	13,000	5,200,000	
	- Uang Lembur Sopir [1 Orang x 2 Jam x 50 Hari]	100.0 OJ	13,000	1,300,000	
	- Uang Lembur Pramubakti [2 Orang x 2 Jam x 50 Hari]	200.0 OJ	13,000	2,600,000	
	- Uang Makan Lembur Satpam, Sopir, Pramubakti [7 Org x 50 Hari]	350.0 OH	30,000	10,500,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan )			4,000,000	RM
	- DokumentasiPencetakanPenggandaanLaminasi	1.0 Tahun	2,000,000	2,000,000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan	1.0 Tahun	2,000,000	2,000,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.142-Painan )			6,000,000	RM
	- Barang Operasional untuk penanganan Pandemi COVID-19	1.0 Tahun	6,000,000	6,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.142-Painan )			61,000,000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 Tahun	61,000,000	61,000,000	
<b>B</b>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			95,025,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.142-Painan )			3,000,000	RM
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	1.0 Tahun	3,000,000	3,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.142-Painan )			77,000,000	RM
	- Belanja Langganan listrik	1.0 Tahun	77,000,000	77,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.142-Painan )			3,500,000	RM
	- Belanja Langganan Telepon	1.0 Tahun	3,500,000	3,500,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.142-Painan )			3,500,000	RM
	- Belanja Langganan Air	1.0 Tahun	3,500,000	3,500,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.142-Painan )			2,025,000	RM
	- Belanja Langganan Zoom	9.0 Bulan	225,000	2,025,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.142-Painan )			6,000,000	RM
	- Pelaksanaan Rapid Test COVID-19	1.0 Tahun	6,000,000	6,000,000	
<b>C</b>	<u>Pemeliharaan Perkantoran</u>			196,650,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.142-Painan )			83,310,000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	1137.0 M2	10,000	11,370,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	654.0 M2	110,000	71,940,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.142-Painan )			8,770,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan	70.0 M2	99,000	6,930,000	
	- Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan	230.0 M2	8,000	1,840,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.142-Painan )			104,570,000	RM
	- Kendaraan Roda 4	2.0 Unit	28,500,000	57,000,000	
	- Kendaraan Roda 2	2.0 Unit	800,000	1,600,000	
	- Inventaris Kantor	15.0 OT	80,000	1,200,000	
	- Personal KomputerLaptop	21.0 Unit	500,000	10,500,000	
	- Printer	18.0 Unit	500,000	9,000,000	
	- UPS	10.0 Unit	200,000	2,000,000	
	- AC StandingSplitCasette	17.0 Unit	610,000	10,370,000	
	- Genset	2.0 Unit	5,000,000	10,000,000	
	- Tabung Pemadam	8.0 unit	300,000	2,400,000	
	- Faksimili	1.0 unit	500,000	500,000	
D	<i>Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			207,417,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.142-Painan )			118,720,000	
	> Honor Pengelola Keuangan			76,000,000	
	- Honor Pengelola Keuangan	1.0 Tahun	61,600,000	61,600,000	
	- Honor Tim SAI	1.0 Tahun	14,400,000	14,400,000	
	> Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik			42,720,000	
	- KPA [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- PPK [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	1,210,000	14,520,000	
	- PPSPM [1 Orang x 12 Bulan]	12.0 OB	480,000	5,760,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [2 Orang x 12 Bulan]	24.0 OB	310,000	7,440,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan )			60,125,000	RM
	> Pengadaan Seragam			29,825,000	
	- Seragam Pegawai [14 Peg x 2 Stel]	28.0 OT	782,000	21,896,000	
	- Seragam Satpam [4 Peg x 1 Stel]	4.0 OT	1,497,000	5,988,000	
	- Seragam Sopir [1 Peg x 1 Stel]	1.0 OT	647,000	647,000	
	- Seragam Pramubakti [2 Peg x 1 Stel]	2.0 OT	647,000	1,294,000	
	> Obatobatan dan Dokter			16,650,000	
	- Obatobatan [15 Peg x 1 Tahun]	15.0 OT	150,000	2,250,000	
	- Dokter [12 Bulan]	12.0 Bulan	1,000,000	12,000,000	
	- Peningkatan Kebugaran	12.0 Bulan	200,000	2,400,000	
	> Penyelenggaraan RapatJamuan Tamu			13,650,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020**

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN  
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan  
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN  
 ALOKASI Rp. 1,506,072,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	- Konsumsi RapatPenerimaan Tamu	12.0 Bulan	800,000	9,600,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [15 Peg x 15 Hari]	225.0 OH	18,000	4,050,000	
	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.142-Painan )			11,760,000	
524111	- Honor Pejabat PBJ	12.0 OB	680,000	8,160,000	RM
	- Honorarium PenyimpanPengurus BMN	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.142-Painan )			15,012,000	
	> Perjalanan Dinas Biasa			15,012,000	
524113	- Transport [3 Orang x 3 Kali]	9.0 OK	410,000	3,690,000	RM
	- Akomodasi [3 Orang x 3 Kali x 1 Hari]	9.0 OH	650,000	5,850,000	
	- Uang Harian [3 Orang x 3 Kali x 2 Hari]	18.0 OH	304,000	5,472,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan )			1,800,000	
	- Transport Lokal [2 Orang x 6 Kali x 1 Hari]	12.0 OK	150,000	1,800,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

PAINAN, 28 Januari 2021



**LITA QADARINA HARDIAN**  
 NIP 197509251995112001